

Hari/Tanggal : Rabu, 11 November 2020

Waktu : 10.00 WITA - Selesai

**Tempat : Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu
: Budaya, Universitas Hasanuddin (Via Daring)**

**KOMANDO RESOR MILITER (KOREM) 141/TODDOPULI DI
SULAWESI SELATAN TAHUN 1956-1980**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

Oleh:

RAHMADI

Nomor Pokok: F811 16 511

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

SKRIPSI

**KOMANDO RESOR MILITER (KOREM) 141/TODDOPULI DI
SULAWESI SELATAN TAHUN 1956-1980**


Disusun dan diajukan oleh:


RAHMADI

F811 16 511

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 11 November 2020 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.

Menyetujui,
Komisi Pembimbing
Konsultan I **Konsultan II**


Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.
NIP. 19641217 199803 1 001


Nasihin, S.S., M.A.
NIDK. 8834401019

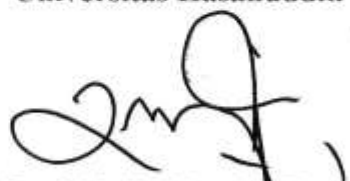
Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 19640716 199103 1 010

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**


Dr. Nahdia Nur, M.Hum.
NIP. 19650321 199803 2 001

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Rabu, 11 November 2020, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:



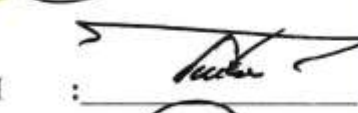



**KOMANDO RESOR MILITER (KOREM) 141/TODDOPULI DI
SULAWESI SELATAN TAHUN 1956-1980**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin

Makassar, 11 November 2020



PANITIA UJIAN SKRIPSI

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Ketua | : |  |
| 2. Nasihin, S.S., M.A. | Sekretaris | : |  |
| 3. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum. | Penguji I | : |  |
| 4. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag. | Penguji II | : |  |
| 5. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Konsultan I | : |  |
| 6. Nasihin, S.S., M.A. | Konsultan II | : |  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadi

NIM : F811 16 511

Departemen : Ilmu Sejarah FIB Unhas


Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian sendiri. Jika di kemudian hari ternyata ditemukan Plagiarisme maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku dan saya bertanggung jawab secara pribadi dan tidak melibatkan pembimbing dan penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak lain.

Makassar, 11 November 2020

Yang membuat pernyataan,




Rahmadi
F811 16 511



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Hal pertama yang sejatinya kita ucapkan adalah dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menentukan segala sesuatu berada ditangan-Nya sehingga tidak ada setetes embunpun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan melalui tahapan yang sangat panjang selama berada di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini berjudul “ **Komando Resor Militer (Korem) 141/Toddopuli di Sulawesi Selatan Tahun 1956-1980**”. Penulis bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Penulisan Skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang penulis alami, prosos pengerjaannya dalam situasi Pandemi Covid-19 sehingga membuat penulis sedikit terhambat terutama mencari sumber-sumber dan literatur yang berhubungan dengan objek kajian, tetapi dengan usaha dan tekak yang besar sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para mahasiswa sejarah. Penulis banyak mendapat pelajaran, motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahhanda **Hammading** dan Ibundaku **Rasdiana** yang tiada hentinya memberikan doa tulus, kasih sayang, pengorbanan, pengertian, kepercayaan, semangat dan dorongan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin sampai pada akhir tahapan ini, untuk mereka tidak ada kata-kata yang bisa penulis sampaikan, hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada **Arman, Amri, Alwi dan Edy Suroyo** yang merupakan kakak, adik dan sepupu penulis yang selalu memberikan semangat dan bantuannya. Tak lupa juga penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih kepada **Tante Tirasa** dan **Om** (orang tua dari Fitri) yang telah menganggap penulis sebagai keluarganya dan selalu memberikan kebaikan kepada penulis.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Penulis sangat berterima kasih kepada **Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Beliau merupakan salah satu dosen yang memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Serta **Nasihin, S.S., M.A.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk membantu serta membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi. Penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu yang telah diberikan. Serta penulis banyak ucapkan terima kasih kepada **Kanda Alif** yang telah memberikan arahan dan bantuan sekaligus penyambung lidah antara pembimbing penulis.

2. **Dr. Bambang Sulistyو Edi Purwanto, M.S.**, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama 3 tahun lebih semenjak penulis mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin.
3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Ibu **Dr. Nahdia Nur, M.Hum** dan **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. Ag.**, selaku Sekretaris departemen. Terima kasih juga kepada seluruh staf dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, **Alm Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba, M.A., Almarhuma Margriet Mokka Lappia, S.S., M.S., Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A., Dr. Ilham, S.S., M.Hum., Dr. Bahar Akkase Teng, Lcp., M.Hum., Dr. Abd. Rahman Hamid, M.Si., A. Lili Evita, S.S., M.Hum., Dr. Muslimin AR Effendy, M.A.**, atas segala ilmu dan pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Sejarah. Tak lupa pula menulis berterima kasih kepada **Uddjie Usman Pati S.Sos.**, selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Sejarah.
4. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya, terkhususnya kepada staf pengawai yang telah membantu segala jenis pengurusan berkas penulis selama berada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
5. Kepada Pangdam XIV/Hasanuddin beserta para staf anggotanya yang telah membantu penulis untuk mengizinkan dan menyediakan bahan berupa arsip dan buku yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi

ini, serta ucapan terima kasih kepada Danrem 141/Toddopuli yang telah mengizinkan dalam melanjutkan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.

6. Teman-teman sejiwa dan seperjuangan penulis di Departemen Ilmu Sejarah angkatan 2016, **Allu, Rais, Akang, Ammar, Hendra, Erwin Gutawa, Erwin S, Isman, Alle, Burhan, Arafah, Ical, Alam, Farul, Siska, Pitto, Eve, Intan Rifana, Kiki, Ega, Tati, Jusni, Erni, Ben, Nisa, Dayen, Intan Dw, Sinar, Dewi dan Selfi** yang telah bersama-sama dengan penulis dalam mengikuti pendidikan dan berproses selama 4 tahun lebih di Universitas Hasanuddin. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas pertemanan dan pengalaman yang telah dijalani bersama-sama, penulis yakin bahwa kelas 212 dan 324 merupakan saksi sejarah yang akan selalu mengingatkan kita pada suatu hari nanti.
7. Kepada keluarga besar HUMANIS KMFIB-UH, yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga kepada penulis, dalam lembaga tersebut telah mengajarkan untuk menjunjung tinggi kebersamaan dan kemanusiaan serta berbagai hal yang penulis tidak dapatkan dalam perkuliahan, untuk senior-senior **Karim, Oval, Herman, Maman, Apos**, dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, penulis banyak ucapkan terima kasih. Serta adik-adik di HUMANIS **Darwan, Ramin, Fika, Ismi, Mimi, Syarif, Yudi** tetaplah berproses dan belajar.
8. Teman-teman KKN Angkatan 102 Desa Lemoape Kabupaten Bone, **Eki** (Perikanan), **Mahdi** (Teknik), **Yuda** (Hukum), **Risna** (Kehutanan), **Soraya** (Hukum), **Irma** (Peternakan) dan **Maryam** (MIPA), yang telah

memberikan pengalaman yang sangat berharga dan berkesan kepada penulis.

9. Sahabat *Receh Pitto, Eve, Ikkha, Allu, Rais*, penulis yakin tawa kegirangan akan selalu ada, berbagi duka dan kesenangan semua tidak akan pernah usai, lukisan-lukisan cerita akan selalu tercipta, semoga selepas ini tidak ada yang berubah selalu bersama apapun yang terjadi.

Kalian Hebat. Penulis banyak ucapkan terima kasih.

10. Untuk teman hidup penulis. **Ikkha**, dialah orang yang sangat berjasa dari proses penelitian hingga terciptanya tulisan ini, yang setia menemani penulis dalam kondisi dan keadaan apapun.

Makassar, 11 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xixx
ABSTRACT	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Alasan Memilih Judul	9
1.3. Rumusan Masalah.....	11
1.4. Batasan Masalah	11
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Tinjauan Pustaka.....	15
1.8. Sistematika Penulisan	22
BAB II KONDISI POLITIK DAN KEAMANAN DI SULAWESI SELATAN 1950-1980	24
2.1. Masa Kekacauan 1950-1960	25
2.2. Akhir Pemberontakan 1960-1967	37
2.3. Zaman Baru 1967-1980	45
BAB III PERKEMBANGAN KOREM 141/TODDOPULI 1956-1965	51
3.1. Dari Lahir Hingga Perubahan Status	52
3.2. Profesionalisasi Personil	61
3.3. Operasi Militer.....	69
3.3.1. Satgas I Hasanuddin di Sulawesi Utara	72
3.3.2. Operasi Garuda.....	76
3.3.3. Operasi Badai	77
BAB IV KOREM 141/TODDOPULI 1965-1980	83
4.1. Tanggungjawab Kewilayahan	84
4.2. Komandan Korem 141/Toddopuli.....	86

4.3. Pelaksanaan Tugas.....	90
BAB V PENUTUP	98
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	106

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

No.	Istilah dan Singkatan	Keterangan
1.	ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
2.	ALRI	Angkatan Laut Republik Indonesia
3.	AMD	ABRI Masuk Desa
4.	APRIS	Angkatan Bersenjata Republik Indoneisa Serikat
5.	Batalyon	Satuan dasar tempur dibawah Brigade atau Resimen yang terdiri dari suatu markas, kompi markas dan beberapa kompi. Biasanya yang menjadi komandan adalah seorang Letnan Kolonel atau Kolonel
6.	BINTALDAM	Pembinaan Mental Kodam
7.	MBAD	Markas Besar Angkatan Darat
8.	BKR	Badan Keamanan Rakyat
9.	Brigif	Brigade Infanteri
10.	Brigade	Adalah satuan dibawah Divisi yang terdiri dari 3.000 sampai 5.000 orang yang dipimpin oleh seorang Kolonel atau Brigadir Jenderal. Biasanya terbentuk dari tiga Batalyon dengan unsur tempur, unsur bantuan tempur dan unsur bantuan administrasi.
11.	BTP	Batalyon Team Pertempuran
12.	CPM	Corps Polisi Militer
13.	CTN	Corps Tjadangan Nasional
14.	Divisi	Adalah satuan tempur yang lebih besar di atas

		Brigade yang memiliki kekuatan penuh dan satuan militer terbesar, dengan unsur tempur, bantuan tempur, unsur administrasi. Biasanya terdiri dari 10.000 sampai 20.000 orang. Dengan pangkat komandannya adalah seorang Mayor Jenderal
15.	DI/TII	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
16.	DISJARAHDAM	Dinas Sejarah Kodam
17.	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
18.	DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19.	DPR-GR	Dewan Perwakilan Rakyat- GotongRoyong
20.	Golkar	Golongan Karya
21.	GPL	Gerombolan Pengacau Liar
22.	G 30 S	Gerakan 30 September
23.	<i>Haiho</i>	Merupakan tentara pembantu, pasukan didikan Jepang yang terdiri dari orang-orang Indonesia, pasukan ini dibentuk untuk membantu pekerjaan kasar militer seperti membangun kubu atau parit pertahanan dan menjaga tahanan
24.	HIS	<i>Hollandsch-Inlandsche School</i> merupakan sekolah milik Belanda yang didirikan pada tahun 1914 di Hindia Belanda (Indonesia) dengan masa sekolah tujuh tahun dan Bahasa Belanda sebagai pengantar, sekolah ini diperuntuhkan untuk penduduk asli (bumiputra) atau anak-anak bangsawan dan tokoh-tokoh terkemuka.

25.	Inf	Infanteri
26.	Infanteri	Merupakan pasukan pejalan kaki dengan perlengkapan persenjataan ringan untuk melakukan pertempuran jarak dekat dan merupakan kesenjataan tempur utama darat
27.	IPB	Institut Pertanian Bogor
28.	IPOLEKSOSBUD	Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya
29.	JARAHDAM	Sejarah Kodam
30.	<i>Kaigun</i>	Angkatan Laut Jepang
31.	KNI	Komite Nasional Indonesia
32.	KMB	Konferensi Meja Bundar
33.	KDMSST	Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan Tenggara
34.	Ko-DPSST	Komando Daerah Pertempuran Sulawesi Selatan Tenggara (kata Pertempuran dirubah menjadi Pengamanan)
35.	Kodam	Komando Daerah Militer
36.	Korem	Komando Resor Militer
37.	KSAD	Kepala Staf Angkatan Darat
38.	KRU	Komando Reserve Umum
39.	KNIL	<i>Koninklijke Nederlands Indische Leger</i> (Tentara Kerajaan Hindia Belanda)
40.	KDM	Komando Daerah Militer
41.	Kodim	Komando Distrik Militer
42.	KMKB	Komando Militer Kota Besar

43.	Kodam-SST	Komando Daerah Militer-Sulawesi Selatan Tenggara
44.	KOWIL	Komando Wilayah
45.	Kompi	Merupakan satuan militer di bawah Batalyon, biasanya terdiri dari tiga sampai empat Peleton
46.	KASDAM	Kepala Staf Kodam
47.	Militer	Merupakan angkatan bersenjata yang diberi kewenangan untuk menggunakan senjata secara absah oleh negara, diberi kuasa untuk menggunakan cara-cara kekerasan yang mematikan dan senjata mematikan untuk mendukung kepentingan negara
48.	Masyumi	Majelis Syuro Muslimim Indonesia
49.	Malari	Malapetaka Limabelas Januari
50.	MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
51.	MPRS	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
52.	MAKO	Markas Komando
53.	<i>MULO</i>	<i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs</i> “Pendidikan Dasar yang lebih luas” merupakan pendidikan menengah pada masa kolonial, calon siswanya mereka yang lulus dari HIS
54.	Momoc	Moment Mobile Comando
55.	NIT	Negara Indonesia Timur
56.	NKRI	Negara Kasatuan Republik Indonesia
57.	NII	Negara Islam Indonesia

58.	NASAKOM	Nasionalisme, Agama dan Komunis
59.	PPKI	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
60.	PETA	Pembela Tanah Air, merupakan tentara militer yang dibentuk Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang
61.	PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
62.	Permesta	Perjuangan Semesta/Perjuangan Rakyat Semesta
63.	PKI	Partai Komunis Indonesia
64.	Purn.	Purnawirawan
65.	PRI	Partai Rakyat Indonesia
66.	PUSKOPAD	Pusat Koperasi Angkatan Darat
67.	Pangdam	Panglima Kodam
68.	Pemda	Pemerintah Daerah
69.	RIS	Republik Indonesia Serikat
70.	Resimen	hampir sama dengan Brigade, Resimen terdiri dari beberapa Batalyon dengan unsur kesenjataan yang sejenis
71.	RI	Republik Indonesia
72.	RI-Hasanuddin	Resimen Infanteri-Hasanuddin
73.	RMS	Republik Maluku Selatan
74.	RTP	Resimen Team Pertempuran
75.	SEMDAM	Sejarah Militer Kodam
76.	SKUADRON	Merupakan penyebutan istilah tentang sejumlah kapal terbang militer

77.	SATGAS	Satuan Tugas
78.	SOB	<i>Staat Oorieg en Beleg</i> merupakan keadaan perang atau darurat perang
79.	Tentara	Adalah orang-orang yang terpilih yang secara material digaji oleh negara dan dipersiapkan untuk bertempur dalam mempertahankan kedaulatan negara
80.	TNI	Tentara Nasional Indonesia
81.	TKR	Tentara Keamanan Rakyat (5 Oktober 1945) pada 7 Januari 1946 keamanan dirubah menjadi Keselamatan dan penyebutannya tetap TKR
82.	TRI	Tentara Republik Indonesia (26 Januari 1946)
83.	Toddopuli	Apabila suatu ikrar sudah dimufakati bersama, bagaimanapun juga meski dilaksanakan namun menghendaki pengorbanan apapun. Kayakinan yang kuat disertai kesetiaan dan ketabahan, demi menegakkan kebenaran dan menumbangkan kebatilan.
84.	TT-VII	Tentara Teritorial VII
85.	TNI-AD	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat
86.	TRI-PS	Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi
87.	Ton	Peleton, adalah satuan militer di bawah Kompi dengan jumlah pasukan 30-50 personil dan biasanya terdiri dari empat sampai lima regu.

88.	UUD	Undang-Undang Dasar
89.	UNM	Universitas Negeri Makassar
90.	<i>Volk School</i>	Sekolah Rakyat, merupakan sekolah pada masa penjajahan Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1907 dengan masa belajar 3 tahun, sekolah yang diperuntukkan terhadap anak-anak pribumi golongan bawah
91.	Yonif	Batalyon Infanteri
92.	Yon	Batalyon
93.	Zeni	adalah kesenjataan atau kecabangan militer untuk memberikan tugas-tugas bantuan konstruksi dan perintis, dalam TNI-AD terdapat dua macam kesatuan Zeni, yakni Zeni tempur bertugas membantu Satuan Tempur dengan tugas-tugas perintis seperti pemasangan atau pembersihan lapangan ranjau, tugas-tugas penggunaan bahan peledak dan lain-lain, serta Zeni Bangunan bertugas memberi bantuan konstruksi seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan dan sebagainya.

ABSTRAK

Rahmadi (F81116511), dengan judul “Komando Resor Militer (Korem) 141/Toddopuli di Sulawesi Selatan Tahun 1956-1980”, dibimbing oleh Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. dan Nasihin, S.S., M.A.

Skripsi ini merupakan pembahasan tentang sejarah organisasi/satuan militer yaitu Korem 141/Toddopuli di Sulawesi Selatan. Satuan ini dibentuk atas permintaan para perwira lokal yang kecewa atas pembentukan Komando Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan Tenggara (KoDPSST) dan larutnya kekacauan yang terjadi di daerah ini. Pada awal pembentukannya merupakan komando satuan tempur yang membawahi Batalyon Tempur, setelah jadi Korem pada tahun 1960 satuan ini menjadi komando wilayah. Dari awal pembentukannya sampai akhir penelitian ini kebanyakan yang menjadi Komandan adalah para perwira dari Sulawesi Selatan yang pada awalnya mereka yang berjuang pada masa perang mempertahankan kemerdekaan baik yang berjuang di Jawa maupun yang berjuang di daerah asalnya masing-masing. Pada saat pembentukannya sampai tahun 1980 Korem telah banyak berpartisipasi dalam menjaga keamanan di Sulawesi Selatan secara khusus dengan melancarkan Operasi Militer terhadap Gerombolan DI/TII tahun 1956-1967.

Metode Penelitian Skripsi yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, dengan tahapan-tahapannya adalah Pemilihan Judul Penelitian, Pengumpulan Sumber, Verifikasi, Interpretasi dan Penulisan.

Kata Kunci: Korem 141/Toddopuli, Militer, Komandan, Operasi, Gerombolan DI/TII.

ABSTRACT

Rahmadi (F81116511), with the title "141 / Toddopuli Military Resort Command (Korem) in South Sulawesi 1956-1980", guided by Drs. Dias Pradadimara, MA, MS and Nasihin, S.S., M.A.

This thesis is a discussion of the history of military organizations/units, namely Korem 141 / Toddopuli in South Sulawesi. This unit was formed at the request of local officers who were disillusioned by the formation of the South-East Sulawesi Regional Security Command (KoDPSST) and the dissolution of the chaos that had occurred in this area. At the beginning of its formation, it was a combat unit command in charge of the Combat Battalion, after becoming Korem in 1960 this unit became a regional command. From the beginning of its formation until the end of this research, most of those who became commanders were officers from South Sulawesi who were initially those who fought during the war to defend independence, both those who fought in Java and those who fought in their respective areas of origin. From the time of its formation until 1980 the Korem had participated in maintaining security in South Sulawesi in particular by launching Military Operations against the DI / TII Gangs in 1956-1967.

The thesis research method used is the historical research method, with the stages are: Research Title Selection, Source Collection, Verification, Interpretation, and Writing.

Keywords: Korem 141 / Toddopuli, Military, Commander, Operation, Gangs of DI / TII.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara pasti membutuhkan kesatuan militer untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan bangsanya. Militer merupakan suatu organisasi atau kelompok yang dibentuk oleh negara dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara. Militer ditandai dengan memiliki seragam yang sama serta dilengkapi dengan alat persenjataan. Militer diberi kewenangan untuk menggunakan senjata secara absah oleh suatu otoritas negara. Kekuatan yang diberi kuasa untuk menggunakan cara-cara kekerasan yang mematikan dan senjata yang mematikan, untuk mendukung kepentingan dari negara kepada sebagian atau semua dari penduduknya. Tugas militer adalah sebagai alat negara untuk kepentingan pertahanan dari negara menghadapi ancaman atau perang melawan negara lain.¹

Sekarang negara di dunia saling berlomba-lomba untuk menciptakan atau membuat kekuatan militernya semakin kuat, hal ini dikarenakan supaya negara tersebut ditakuti oleh negara-negara lain serta selalu siap siaga akan terjadinya perang. Ada banyak faktor yang menentukan kekuatan suatu negara, diantaranya adalah kekuatan militer. Pada tahun 2020 menurut Global Firepower kekuatan militer terkuat masih dipegang oleh Amerika Serikat, hal itu ditunjang dengan jumlah pasukan, dan sistem senjata militer yang modern. Indonesia sendiri dalam

¹ Andi Muh. Darlis, *Terminologi Militer*. (Yogyakarta: Matapadi Presindo, 2019), hlm. 131.

kekuatan militer terkuat di dunia berada pada peringkat 16 dari 137 negara di dunia, peringkat itu tepat di atas Militer Arab Saudi yang berada di urutan 17.

Jika berbicara tentang militer, pasti selalu berkaitan dengan tentara. Tentara adalah salah satu kelompok profesional yang harus dimiliki oleh negara. Tentara terdiri kelompok orang yang terorganisasi dengan disiplin untuk melakukan pertempuran yang berbeda dengan kelompok atau orang-orang sipil. Tentara adalah orang-orang yang terpilih, yang secara material digaji oleh negara dan dipersiapkan hanya untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara.²

Dalam perjalanan sejarah TNI di Indonesia memiliki catatan sejarah yang cukup panjang mulai dari perubahan nama, dinamika politik yang dimainkan dan masih banyak lagi. Ketika melacak kembali pemikiran militer sejak “pra Indonesia” hingga pertengahan 1960-an, kita menemukan adanya banyak versi pemikiran militer di Indonesia. Ada yang berpusat pada individu, ada yang pada kesatuan, ada yang bertumpuh pada angkatan, ada yang bertumpu pada aliran politik, ada juga yang mengacu pada kepentingan dan cara pandangan blok politik yang ada pada saat itu. Selain itu setiap era dalam kemiliteran Indonesia memiliki pemikiran yang unik, tergantung pada tantangan zaman yang ada pada saat itu.³

Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara yang baru merdeka ini belum memiliki Tentara Nasional. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan pada

² *Ibid.*, hlm. 209.

³ Hario Kecik, *Pemikiran Militer : Sepanjang Masa Bangsa Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm.ix.

tanggal 18 Agustus 1945 telah terdapat dua pasal yang menyinggung Angkatan Perang Republik Indonesia. Pasal 10 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sedangkan pada pasal 30 diamanahkan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.⁴ Langkah pertama untuk menjawab tuntutan proklamasi adalah pembentukan sejumlah lembaga kenegaraan melalui sidang-sidang resmi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18-22 Agustus 1945 diantaranya adalah pembentukan kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat, yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Setelah terbentuknya BKR di pusat, maka di daerah pun melakukan pembentukan yang tergabung dalam BKR ataupun yang berbentuk kelaskaran. Tugas BKR adalah memelihara keamanan bersama rakyat sebagai penolong keluarga korban perang. Meskipun disusun secara kedaerahan dan didukung oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah, BKR tumbuh bukan sebagai tentara reguler tetapi merupakan korps pejuang bersenjata. Disamping BKR, timbul barisan-barisan rakyat yang kemudian akan menjadi laskar rakyat, BKR dan laskar rakyat mempunyai tugas yang sama, yakni membela dan mempertahankan negara Indonesia merdeka.⁵ Sebagian besar anggota BKR adalah bekas dari tentara bentukan Jepang, akan tetapi kesatuan ini tidak dibawa satu komando, mereka merupakan kesatuan yang berdiri sendiri yang terpencar-pencar. Adanya hal yang seperti itu banyak dari golongan-golongan yang merasa kecewa karena aspirasi

⁴M. Rustam. (Skripsi), "*Yonif Linud 700/BS 967-1998*": *Suatu Tinjauan Sejarah Militer*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2002), Hlm. ix.

⁵ Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan Jilid 2*. (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2008), hlm. 50.

mereka tidak tersampaikan dalam BKR sehingga mereka membentuk laskar yang tidak dibawah naungan pemerintah, hal itu dikarenakan mereka menginginkan terbentuknya tentara kebangsaan.

Dalam waktu satu setengah bulan sejak terbentuknya BKR, Presiden mengeluarkan maklumat pada tanggal 5 Oktober 1945, secara resmi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk anggotanya adalah bekas anggota BKR. Yang diangkat sebagai pimpinan TKR adalah Supriyadi, tokoh pemberontak PETA (Pembela Tanah Air) tahun 1944 di Blitar, namun Supriyadi tidak pernah muncul karena telah dinyatakan hilang, sehingga harus diganti. Melalui rapat komando-komando Divisi di seluruh Indonesia di Yogyakarta tanggal 12 November 1945 memilih Sudirman, kepada divisi IV yang berkedudukan di Purwakerto, sebagai panglima besar⁶. Pada tanggal 1 Januari 1946 terjadi perubahan penyebutan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari sesuai maklumat Presiden Tentara keselamatan Rakyat dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Pemantapan organisasi dalam tubuh TRI selanjutnya, pada bulan Mei 1946 diadakan rapat antara Kementrian Pertahanan, Markas Besar Tentara, dan wakil-wakil badan perjuangan. Rapat ini gagal mencapai kesepakatan. Badan-badan perjuangan yang mewakili laskar-laskar bersedia bekerja sama dengan TRI, tetapi menolak untuk meningkatkan diri secara organisasi. Akan tetapi masalah menjadi semakin ruwet kerana didalam pelaksanaannya terjadi dualisme pemerintahan,

⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

laskar-laskar dibawah Biro Perjuangan yang mereka membentuk jawatan-jawatan sendiri, sedangkan TRI sebagai tentara resmi dibawah panglima besar.

Desakan para pemimpin tentara akhirnya dualisme tersebut dihapuskan melalui Dekrit Presiden 5 Mei 1947 yang menyatukan dua “kubu”, antara lain menyatakan : *“Sudah tiba waktunya mempersatukan Laskar dan Tentara dalam suatu organisasi Tentara Nasional Indonesia”*. Sebagai pelaksanaannya, Presiden mengeluarkan Penetapan pada tanggal 7 Juli 1947 yang antara lain ditetapkan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁷

Daerah Sulawesi Selatan yang kita kenal sekarang terbentang pada jazirah Selatan pulau Sulawesi memiliki perjalanan sejarah yang selalu menarik untuk dibicarakan dan tidak pernah habisnya. Bahkan Sulawesi Selatan pernah diberi label oleh Belanda sebagai pulau yang penuh keonaran. Seperti halnya pada saat memasuki tahun 50-an tepatnya pada bulan April 1950, di Sulawesi selatan terjadi suatu pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz karena menolak kedatangan pasukan TNI yang dikirim dari Jawa. Setelah itu tahun-tahun berikutnya banyak kejadian-kejadian yang mewarnai catatan sejarah daerah ini seperti permasalahan gerombolan, bahkan pada tahun 50-an Sulawesi Selatan dikenal sebagai tahun-tahun gerombolan.

Kalahnya pendukung negara federal, pertanyaan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab terhadap nasib para bekas gerilyawan berjumlah 15.000 orang itu mulai muncul dipermukaan. Masalah tersebut merupakan titik awal dari

⁷ A. H. Nasution, *Kekaryaan ABRI*. (Jakarta: Serceling Masa, 1971), hlm. 6.

masa-masa paling sulit dalam sejarah Sulawesi Selatan.⁸ Selain dari gerilyawan Kahar Muzakkar yang begitu dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya yang memunculkan ketidakamanan di Sulawesi Selatan hingga merebabnya persoalan militer, ternyata masih banyak lagi kelompok gerilyawan yang tidak tergabung kedalam satu kelaskaran Kahar Muzakkar, contohnya Mobile Ratulangi dan Lipang Bajeng yang bergerak disekitar Jeneponto hingga tahun 1952, pimpinan Andi Makkulau dan Ismail pada tahun 1954-1960 yang bergerak disekitar Pinrang.

Sebagai salah satu pelaksanaan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) maka ditunjuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku kordinator keamanan seluruh Indonesia untuk menjaga keamanan selama masa peralihan. Setelah itu akan membentuk penguasa militer pada daerah Republik Indonesia Serikat (RIS) ketika itu, tetapi di Sulawesi Selatan pembentukan itu tidak tercapai, sehingga pada daerah ini dibentuk Komisi Militer dan Teritorial Indonesia Timur, yang diketuai oleh Ir. Putuhena. Pada awal akhir tahun 1949 dibentuk tujuh teritorial diseluruh Indonesia, Teritorial VII berkedudukan di Makassar yang menjadi panglima adalah Letnan Kolonel Achmad Yunus Mokoginta.

Sebelum pembentukan Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan Tenggara (KDMSST) pada tanggal 29 Mei 1957 awalnya telah dibentuk Komando Daerah Pertempuran Sulawesi Selatan Tenggara (Ko DPSST) pada tanggal 15 Juli 1956 yang menjadi panglima adalah Kolonel Sudirman dari Divisi Brawijaya untuk menyelesaikan kekacauan yang ada di daerah ini. Permasalahan

⁸ Christian Perlas, *Manusia Bugis*. (Jakarta: NALAR, 2006), hlm. 334.

tambah rumit karena awalnya pembentukan satuan ini merupakan permintaan dari para Perwira lokal di Sulawesi Selatan, namun dalam pelaksanaannya yang ditunjuk sebagai komandan adalah bukan dari kalangan mereka, sehingga dibentuklah Komando Reserve Umum Hasanuddin (KRU Hasanuddin) oleh Mayor Inf M. Yusuf pada 5 Oktober 1956, pada satuan ini memiliki 7 Batalyon yang semua komandan Batalyonya adalah para Perwira lokal Sulawesi Selatan.

Kodam XIV/Hasanuddin yang awalnya bernama Komanda Daerah Militer Sulawesi Selatan Tenggara (KDMSSST) dibentuk ditegah-tengah kemelut pergolakan-pergolakan politik, ekonomi, sosial dan budaya di seluruh tanah air yang diwarnai oleh kontradiksi-kontradiksi menuju pada perpecahan keutuhan nasional. Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, termasuk salah satu daerah yang cukup jauh terlibat dalam kemelut yang demikian, yang akibatnya telah menjerumuskan daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara pada situasi kekacauan yang berlarut-larut.⁹ melalui surat keputusan KSAD Nomor: 246/5/1957 tertanggal 29 Mei 1957 mengangkat Letnan Kolonel Inf. Andi Mattalatta sebagai pejabat Komandan dan Mayor CPM Haeruddin Tasning sebagai pejabat Kepala Staf KDM-SST. Peresmian terbentuknya Kodam XIV/Hasanuddin tertanggal 1 Juni 1957.¹⁰ Selain itu untuk lebih mempermudah langkah Kodam untuk mengamankan daerah Sulawesi Selatan dari para pengacau, maka dibentuklah satuan-satuan tempur yang nantinya akan melaksanakan operasi-operasi.

⁹ JARAH DAM XIV/HASANUDDIN, *25 Tahun Kodam XIV Hasanuddin 1957-1982*. (Ujung Pandang: JARAH DAM XIV HASANUDDIN, 1982), hlm. 285.

¹⁰ Radik Djarwada cs, *Corps Hasanuddin "Pradjurit Tempur dan Pembangunan"*. (Ujung Pandang: Sekretaris Djenderal "Corhas", 1972), hlm. 116.

Tahun 1950-an pergolakan politik telah melanda diseluruh wilayah di Indonesia yang membawa dampak sangat besar terhadap bangsa dan negara yang dapat membahayakan semangat proklamasi sehingga dapat menggoyahkan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk sebagian besar rakyat dan pemuda Indonesia, revolusi dan kemerdekaan lebih merupakan suatu perwujudan dari suatu cita-cita yang “indah”. Akan tetapi, bagi sebagian kecil pemimpin, revolusi dan kemerdekaan merupakan suatu strategi dan taktik yang harus dihitung dengan hati-hati.¹¹

Peran yang diambil tentara bangsa Indonesia dalam proklamasi sangat besar. Demikian juga tentara resmi maupun dalam Laskar-Laskar dalam revolusi. Tentara yang bergerilya berhasil mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia pada waktu terdesak, dengan menyakinkan PBB. Setelah itu peran tentara sangat penting terutama dengan berhasilnya Tentara dalam memadamkan pemberontakan-pemberontakan.

Sejarah adalah rekontruksi masa lalu apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh orang.¹² Penulisan suatu sejarah adalah kurang lebih untuk mengungkapkan kembali perkembangan perbuatan, tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial, gunanya adalah untuk mewariskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Maka dengan itu tugas seorang sejarawan adalah merekontruksi peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan metode-metode ataupun kaidah sejarah melalui suatu historiografi yang akan

¹¹ Soe Hok Gie, *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan*. (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 1999), hlm. 67.

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 1995), hlm. 18-19.

selalu berinteraksi dengan fakta dan sumber-sumber pendukungnya. Dalam pengertian yang umum, seorang sejarawan melakukan hal itu untuk menyadarkan sesama mengenai masa silam.¹³

Dengan hal yang telah dinarasikan pada paragraf sebelumnya penulis mencoba mengungkapkan melalui suatu penelitian sejarah mengenai “ ***Komando Resor Militer (Korem) 141/Toddopuli di Sulawesi Selatan tahun 1956-1980***”. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dikaji, dikarenakan pembentukan dari Korem 141/Toddopuli yang awal pembentukannya bernama Komando Reserve Umum Hasanaddin (KRU-Hasanddin) merupakan salah satu titik balik para penguasa militer di daerah yang pada sebelumnya yang menjadi penguasa militer adalah orang-orang bukan dari Sulawesi Selatan melainkan seperti para Perwira dari Minahasa. Untuk dapat mempermudah langkah dari Kodam XIV/Hasanuddin untuk menyelesaikan perlawanan dan pemberontakan yang ada di Indonesia Timur khususnya Sulawesi Selatan.

1.2. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis dalam memilih judul tersebut adalah karena kedekatan emosional dan intelektual, karena menurut Kuntowijoyo penelitian atau kerja akan baik ketika orang tersebut senang dan mampu, apalagi jika kita melihat kajian sejarah militer itu sangat terbatas apalagi yang bersifat lokal.

Secara umum dalam pembahasan periode pada tahun-tahun 50-an di Indonesia kajiannya sangat terbatas, dikarenakan pada tahun ini merupakan tahun yang sangat sulit untuk dikaji dalam periode sejarah Indonesia. Hal tersebut telah

¹³ F.R. Ankersmit, *Refleksi Tentang Sejarah*. (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 349.

diungkapkan oleh peneliti Indonesia ternama Ruth Mc Vey (1994), mengatakan bahwa tahun 1950-an adalah “dekade yang hilang” bagi kajian tentang Indonesia. Mc Vey menyimpulkan demikian karena dari kajiannya sendiri diketahui bahwa masa ini adalah masa dimana masyarakat Indonesia bergerak secara dinamis disemua bidang baik sosial, ekonomi, maupun politis, meski kajian masa ini sedikit sekali.¹⁴

Lebih terkhusus lagi kajian sejarah lokal pada masa ini sangat membutuhkan perhatian, terkhusus kajian tentang masyarakat Sulawesi Selatan tahun 1950-1980an. Meski telah ada beberapa sejarawan yang mengaji sejarah lokal Sulawesi Selatan pada masa ini tetapi itu masih dianggap sangat kurang jika kita bandingkan kejadian-kejadian pada masa itu apalagi yang bersifat kemiliteran. Padahal, dari sedikit kejadian yang ada diketahui bahwa dimasa itu terjadi dinamika masyarakat yang sangat tinggi, tidak hanya dalam bidang militer tapi juga dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Masyarakat Sulawesi Selatan tidak hanya berperang tapi juga menonton bioskop, tidak hanya berjuang di hutan tapi juga menuntut ilmu di lembaga perguruan tinggi, dan tidak hanya berusaha menjadi komandan tapi juga berusaha menjadi politisi partai.¹⁵

Beberapa yang telah diungkapkan di atas menulis berusaha mengungkapkan sejarah Korem 141/Toddopuli 1956-1980. Diantaranya pada periode ini bangsa Indonesia memiliki banyak persoalan terkhususnya di

¹⁴ Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay, “Pengantar Historiografis,” dalam Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay. (Penyunting), *Negara dan Masyarakat di Sulawesi Selatan di Tahun-Tahun 1950-an*. (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

Sulawesi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tahun ini merupakan tahun yang penuh kekacauan di Sulawesi Selatan atau disebut juga “ zaman gerombolan”. Hal itu dikarenakan karena adanya pertentangan di dalam tubuh Angkatan Darat itu sendiri, pertentangan ideologi politik serta pertentangan tentang cita-cita bangsa yang baru merdeka dari para bangsa penjajah.

1.3. Rumusan Masalah

- 1) Apa yang melatarbelakangi pembentukan Korem 141/Toddopuli serta bagaimana perkembangannya?
- 2) Apa peranan Korem 141/Toddopuli dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan?

1.4. Batasan Masalah

Skripsi ini, penulis menggunakan batasan waktu (Temporal) yang dimulai pada tahun 1956, karena pada tahun ini merupakan awal berdirinya Korem 141/Toddopuli, hingga penulis membatasi pada tahun 1980, penulis ingin melihat seperti apa perkembangan Korem dari sejak ia dibentuk sampai dengan tahun 1980.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui dinamika militer di Sulawesi Selatan pada umumnya, dan juga dapat mengetahui apa latar belakang dibentuknya Korem 141/Toddopuli, perannya serta dapat mengetahui pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Korem 141/Toddopuli.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa sejarah, kiranya penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penulisan tugas atau pustaka yang kiranya membahas mengenai dunia militer di Sulawesi Selatan, serta dapat memberikan pemahaman yang baru bagi pembaca tentang bagaimana dinamika militer di Sulawesi Selatan dalam hal ini Korem 141/Toddopuli.

Manfaat yang tidak kalah pentingnya penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

1.6. Metode Penelitian

Penjelasan yang sederhana sejarah merupakan peristiwa, sejarah itu merupakan kisah atau penjelasan tentang peristiwa, yang didalamnya melibatkan manusia sebagai pelakunya. Sejarah itu tidak selamanya apa yang telah terjadi, karena apa yang sudah terjadi atau sejarah itu dua macam, yaitu yang terjadi di luar pengetahuan manusia disebut juga sejarah objektif dan yang terjadi sepengetahuan manusia disebut juga sejarah subjektif.¹⁶ Tugas seorang sejarawan meluruskan yang “bengkok”, mengungkap apa yang betul-betul terjadi, maka dari itu sejarawan yang baik adalah sejarawan yang objektif. Sejarawan tentunya merasa beruntung karena dua hal. Pertama, pencatatan itu berarti bahwa peristiwa-peristiwa yang penting tidak dilupakan begitu saja. Kedua, adanya penulisan sejarah akan meringankan tugas sejarawan dalam penulisan sejarah.

¹⁶ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 2 .

Setiap ilmu pasti mempunyai metode. Tanpa metode kumpulan pengetahuan tentang objek tertentu tidak dapat dikatakan sebagai ilmu, sekalipun masih ada syarat lain.¹⁷ Begitupun dalam penulisan sejarah, yang memiliki metode tersendiri untuk sampai kepada suatu tulisan sejarah.

Prosedur penulisan sejarah adalah cara kerja untuk menganalisa dokumen-dokumen yang ada sebagai bukti yang dapat dipercaya. Pada dasarnya cara kerja sejarawan bertumpuh pada empat kegiatan pokok yang penulis lakukan yakni; mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, menyimpulkan bahan-bahan yang autentik, mengumpulkan kesaksian yang autentik dan yang terakhir menyusun dalam bentuk kerja ilmiah.¹⁸

Sebelum sampai pada kegiatan pokok tersebut dalam penelitian sejarah, awalnya seorang sejarawan diperhadapkan pada penentuan topik penelitian. Bukan karena sedikitnya pilihan, tetapi sebaliknya, karena dalam sejarah Indonesia hampir semua masalah merupakan hal yang baru, yang belum ditulis orang. Dalam pemilihan topik harus dipertimbangkan baik-baik, topik yang akan dipilih dapat dikerjakan sesuai waktu yang tersedia, tidak terlalu luas sehingga waktu yang tersedia cukup, sumber penelitian yang cukup dan belum ada tulisan yang sebelumnya.

Menurut Kuntowijoyo topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dua syarat itu, subjektif dan objektif, sangat

¹⁷ Abdul Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 40.

¹⁸ Hugiono dan Poewantara, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1967), hlm. 25.

penting karena orang akan hanya bekerja dengan baik kalau dia senang dan mampu.¹⁹

Dari gambaran yang telah dijelaskan sebelumnya setelah selesai menentukan topik maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah *Heuristik*, penulis melakukan penelitian di Arsip Daerah Sulawesi Selatan, kemudian penulis melakukan penelitian di Kodam XIV/Hasanuddin, dan di Korem 141/Toddopuli itu sendiri. Selanjutnya penulis menggunakan *Metode Pustaka*, yakni melakukan pencarian data dengan cara membaca koran, majalah Warta Wirabuana, makalah, buku-buku, jurnal, arsip dan melakukan wawancara terhadap keluarga yang pernah menjadi Komandan Korem 141/Toddopuli.

Dari semua data yang terkumpul, kemudian diseleksi dan dianalisa (Kritik Sumber) dengan tujuan untuk mendapatkan kredibilitas fakta yang dapat dipercaya. Kegiatan ini ada dua macam yaitu kritik eksternal dan kritik internal, kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui materi (arsip, sumber lainnya), huruf dan naskah, cap atau tanda tangan, kelengkapan dari naskah, serta sumber itu sesuai dengan zamannya, sedangkan kritik internal dilakukan untuk mengetahui kredibilitas dari sumber dengan memperhatikan hubungan antara masalah yang terdapat dalam sumber tersebut.

Langkah selanjutnya adalah interpretasi yaitu menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya dengan menggunakan metode kritik, tafsiran usulan yang akan mewarnai pernyataan yang dibuat. Meski telah melalui prosedur tertentu namun seorang sejarawan tidak akan pernah dapat merekonstruksi suatu

¹⁹ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 70.

peristiwa masa lampau seperti apa yang benar-benar terjadi. Seperti yang telah diungkapkan oleh Gottschalk bahwa “dalam suatu proses sejarawan harus memikirkan unsur-unsur yang relevan dalam sebuah dokumen, suatu unsur itu bukanlah apa-apa sesungguhnya yang terjadi, melainkan unsur itu paling dekat dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Sejarah dapat diketahui melalui suatu penyidikan kritis terhadap sumber-sumber yang ada”.²⁰

Kemudian langkah terakhir dari prosedur ini adalah *Historiografi* atau penulisan. Bentuk dari rekaman dan peninggalan masa lampau akan disusun secara sistematis dengan topik yang jelas sehingga akan mudah untuk dimengerti dan dengan tujuan agar pembaca dapat mudah memahaminya.

1.7. Tinjauan Pustaka

Buku yang disusun oleh JARA DAM XIV/HASANUDDIN yang berjudul 25 Tahun Kodam XIV/Hasanuddin 1957-1982. Dalam buku ini dijelaskan secara lengkap perjalanan sejarah dari Kodam XIV/Hasanuddin mulai dari lembaga kesatuan yang menjelaskan mengenai lambang/djuada dari kesatuan induk Kodam XIV/Hasanuddin, satuan-satuan teritorial, dan satuan tempur. Awal pembahasan pada buku ini adalah menjelaskan sekitar terbentuknya Kodam XIV/Hasanuddin yang membahas mulai pada awal tahun 1950-an diantaranya penjelasan mengenai gambaran situasi menjelang pendaratan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Serikat (APRIS), rencana pengeriman Tentara dari Jawa yang ditolak oleh Kapten Andi Aziz yang merupakan tentara KNIL, peristiwa ini disebut sebagai pemberontakan Andi Aziz yang dimulai pada 5 April 1950. Akibat

²⁰ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, diterjemahkan Nugroho Notosusanto. (Jakarta: Indonesian University Press, 1983), hlm. 32.

pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz sehingga pemerintah mengirim ekspedisi TNI ke Sulawesi yang dipimpin oleh Kolonel A.E.Kawilarang yang berkekuatan 8 Batalyon atau 2 Brigade. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sekitar pembentukan Komando Tentara dan Territorium VII Indonesia Timur, pembahasan mengenai kebijakan terhadap pejuang Gerilya di Sulselra, yang pada awalnya mereka berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan, kemudian mereka meminta pengakuan dari pemerintah, dalam proses kebijaksanaan ini lahirlah Corps Tjadangan Nasional yang merupakan wadah bagi para Gerilyawan yang nantinya masuk kedalam Tentara Nasional yang pada akhirnya mengalami permasalahan sehingga menimbulkan lagi kebijakan baru bagi para Gerilyawan tersebut, dan dibahas juga tentang Kahar Muzakkar masuk ke Darul Islam (DI) pada tahun 1953, peristiwa Permesta tahun 1957 dan sekitar pembentukan KDMSST. Pembahasan pada bab selanjutnya mengenai perkembangan organisasi Kodam XIV/Hasanuddin dan satuan-satuan dibawah komandonya yang menjelaskan perkembangan dari tahun ke tahun, penjelasan tentang para komandannya, bidan personilnya dan administrasi. Bab selanjutnya mengenai tugas-tugas yang telah dijalankan oleh Kodam XIV/Hasanuddin mulai dari operasi militer di Sulawesi Selatan, dan operasi militer diluar wilayah Sulawesi Selatan, menjelaskan juga tentang Kekaryaannya yang dilakukan oleh Tentara dan diakhir pembahasannya tentang beberapa prestasi yang didapat.

Barbara Sillars Harvey yang berjudul *Permesta; Pemberontakan Setengah Hati*. Seperti pada judulnya dalam buku ini penjelasan terperinci mengenai Permesta yang awalnya di Makassar kemudian pindah ke Sulawesi Utara, banyak

menjelaskan dinamika konflik yang terjadi antara para perwira daerah dan mereka yang berada di pusat (dalam hal ini di Jawa), menjelaskan juga pertentangan para perwira di Sulawesi, menjelaskan latar belakang munculnya gerakan Permesta, yang pada awalnya merupakan suatu gerakan yang menentang kebijakan pemerintah, dan akhirnya dianggap pemberontak, operasi militer yang dilancarkan hingga pada akhir pemberontakan. Permesta yang lahir di Makassar pada 2 Maret 1957 sewaktu Indonesia masih berada dalam zaman Demokrasi Liberal, pemberontakannya baru dapat dipadamkan pada tahun 1961 sewaktu Indonesia telah dua tahun berada dalam suasana Demokrasi Terpimpin. Gerakan ini muncul karena menuntut agar mereka yang berkausa di pusat mengubah pola kebijaksanaan politiknya, antara lain agar memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah-daerah untuk mengatur dan membangun dirinya sendiri. Motif utama gerakan tersebut pada mulanya jelas adalah kepentingan daerah-daerah yang menurut persepsi para promotornya diperhatikan secara senjang oleh mereka yang berkuasa di pusat.

Barbara Sillars Harvey yang berjudul *Pemberontakan Kahar Muzakkar, Dari Tradisi ke DI/TII*. Dalam buku ini dibahas mulai dari masyarakat dan sejarah tradisional Sulawesi Selatan. Dalam buku ini diberi gambaran umum tentang Sulawesi Selatan dibawah kekuasaan Kolonial Belanda dan pada saat pendudukan Jepang. Penjelasan-penjelasan tentang apa yang terjadi pada masa Revolusi, peristiwa kemerdekaan dan munculnya pemberontakan, Darul Islam di hutan, hingga gambaran-gambaran akhir Pemberontakan. Dalam buku banyak dijelaskan dinamika militer yang terjadi khususnya di daerah Sulawesi Selatan, gambaran

kondisi keamanan dan politik di daerah ini. Buku ini banyak menjelaskan tentang politik militer yang terjadi di Sulawesi Selatan yang akhirnya sistem politik yang terjadi di pemerintahan pusat. Pada tahun 1950-an sebagian besar yang dihadapi di Sulawesi Selatan adalah persoalan pemberontak. Kerusuhan ini muncul seketika orang-orang yang berjuang selama revolusi tidak diberi status resmi dalam Tentara Nasional, pemberontakan Kahar Muzakkar merujuk suatu kenyataan bahwa hubungan pusat dan daerah sangat lemah dan tidak efektif.

Buku dari Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar: dari patriot hingga pemberontak*. Dalam buku ini terdapat beberapa kesamaan dari karya Barbara Sillar Harvey yang telah dijelaskan sebelumnya, namun ada beberapa perbedaan. Buku ini memberi banyak penjelasan mengenai Kahar Muzakkar, tetapi di awal dijelaskan tentang keadaan daerah Sulawesi Selatan, mulai dari keadaan Geografis, Penduduk, Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan keadaan Agama di Sulawesi Selatan, dalam buku Anhar Gonggong juga melihat bahwa pemberontakan Kahar didasarkan atas Siri'-Pesse dan ditopang oleh Idiologi Islam yang dianutnya. Kahar telah menganul dan menerima unsur Siri'-Pesse serta Islam melalui sosialisasi keluarga dan masyarakat di tanah kelahirannya. Siri'-Pesse telah menjadikan bagian dari diri Kahar begitupun pengikutnya yang sebagian besar orang Bugis-Makassar. Menjelaskan tentang gambaran proses pergerakan Kahar dalam menanggapi keputusan-keputusan para petinggi TNI mengenai tuntutan-tuntutannya. Mulai dari penjelasan soal lahirnya masalah-masalah gerilya setelah perang kemerdekaan yang membuat Kahar memutuskan berdiri berseberang dengan Republik, keputusan Kahar memilih Islam sebagai

ideologi gerakannya dalam menyetakan diri sebagai bagian dari gerakan Kartosuwiryo di Jawa Barat, hingga kemudian memutuskan untuk mendirikan negara sendiri yang disebut negara Republik Persatuan Islam Indonesia dengan konsep Chalifah dan ia sendiri sebagai kepala negaranya, dijelaskan juga tentang operasi militer yang dilakukan dan sampai pada ia tewas oleh operasi tersebut.

Buku “*Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*” merupakan buku yang disunting oleh Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng dan Heri Kusuma Tarupay. Penulis menggunakan beberapa tulisan dalam buku ini untuk dijadikan referensi utama tentang melihat kondisi politik dan keamanan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Adapun tulisan yang digunakan dalam buku ini adalah *Negara dan Masyarakat di Sulawesi Selatan di Tahun-tahun 1950-an: Pengantar Historiografis* yang ditulis oleh Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay yang memberikan gambaran umum tentang politik bangsa Indonesia dan Sulawesi Selatan di tahun 1950-an, dijelaskan juga tentang pentingnya periode di tahun 1950-an untuk dikaji, dalam tulisan ini dikatakan bahwa pada periode ini merupakan periode yang hilang terhadap kajian sejarah Indonesia yang artinya masih kurangnya perhatian sejarawan dalam periode ini. Begitupun pada tingkat lokal, kajian masyarakat Sulawesi Selatan masih sangat terbatas. Tulisan kedua adalah tentang *Kronika Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an* yang ditulis oleh Dias Pradadimara, dalam tulisannya mengkronologiskan sejarah Sulawesi Selatan pada akhir masa kolonial sampai pada akhir tahun 1950. Membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, diantaranya tentang konflik pemuda dan pasukan KNIL

di Kota Makassar, peristiwa Westerling sampai kepada masa pemerintahan NIT sejak 1946 sampai dengan dibubarkannya di tahun 1950. Membahas gejolak masa kemerdekaan yang diwarnai dengan gejolak politik dan militer yang kelak terbukti berlangsung lama dan memakan banyak korban. Selain terjadinya gejolak keamanan yang melanda sebagian besar Sulawesi Selatan, nampaknya kehidupan yang terjadi di kota kian berbeda, ditandai dengan berdirinya beberapa lembaga-lembaga pendidikan, prosos pemilihan Dewan Kota Makassar, Pemilihan Umum tahun 1955 sampai kepada pembentukan daerah Sulawesi Selatan Tenggara di awal tahun 1960.

Selanjutnya kumpulan tulisan dari buku Edward L. Poelinggomang, dan Suriadi Mappangara, yang berjudul *Dunia Militer di Indonesia: Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*. Dalam buku tersebut banyak menjelaskan tentang militer dari skala nasional sampai pada militer tingkat lokal. Dalam buku ini penulis menggunakan tulisan Abd. Latief yang berjudul *Dinamika Lokal Militer di Sulawesi Selatan*. Awal penjelasan dalam tulisan ini adalah membahas tentang Gerilya terkhusus seorang Kahar Muzakkar, dalam tulisan ini dikatakan bahwa bukan satu-satunya Kahar yang bertanggungjawab terhadap merebahnya masalah militer dan keamanan di Sulawesi Selatan selama periode 1950-1965. Terdapat beberapa kelompok Gerilyawan yang tidak tergabung dalam pasukan Kahar Muzakkar. Lebih jauh lagi tulisan ini membahas tentang dinamika militer yang terjadi di Sulawesi Selatan, terjadi kekacauan politik di tubuh Tentara sendiri yang akhirnya diakibatkan oleh politik ditingkat nasional, akhir pembahasan dalam

tulisan ini adalah tentara menuju Orde Baru, Tentara mulai memberikan perhatian sepenuhnya terhadap politik.

Karya Andi Muh. Darlis yang berjudul *Terminologi Militer*. Suatu tulisan yang sangat penting, tulisan ini banyak menjelaskan istilah-istilah dalam kemiliteran, tulisan ini bisa dikatakan sebagai ensiklopedia militer yang disusun berdasarkan alfabet. Dalam tulisan ini selain memberikan penjelasan-penjelasan tentang istilah-istilah militer, juga disugukan penjelasan mengenai jalur-jalur komando dalam Tentara, jumlah prajut dalam satu kesatuan mulai dari Divisi sampai ke Regu. Terdapat unsur-unsur dalam militer, yaitu Unsur Tempur seperti Batalyon Infanteri, Unsur Bantuan Tempur seperti Kaveleri dan Unsur Administrasi seperti Rumah Sakit, Polisi Militer.

Selanjutnya adalah karya yang sangat penting dari M.C Ricklefs berjudul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Dalam buku ini menjelaskan sejarah Indonesia dari masuk Islam sampai pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia dengan batasan tahun 2008, penulis banyak mengambil bagian dalam buku ini yaitu pada Bab VI yang berjudul Indonesia Merdeka, menjelaskan mengenai semua aspek kehidupan baik dalam sistem pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, agama, dan tidak kalah penting adalah penjelasan mengenai Tentara.

Buku dari Kuntowijoyo yang berjudul *Pengantar Ilmu Sejarah dan Metodologi Sejarah*. Dalam buku ini banyak memberi penjelasan dan gambaran-gambaran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah penulisan, terkhusus pada penulisan sejarah. Kemudian pendekatan-pendekatan yang harus

dilakukan dalam melakukan penelitian, dan yang terpenting adalah metode yang harus dilakukan untuk membuat suatu karya ilmiah. Buku yang berjudul *Pengantar Ilmu Sejarah* menjelaskan tentang Ilmu Sejarah dalam bekerja, disugukan pemahaman dasar tentang pengetahuan sejarah mulai dari pengertian, definisi Sejarah, kegunaan sejarah, perkembangan ilmu sejarah sejak zaman Yunani dan Romawi sampai pada abad ke-20, dideskripsikan tentang sejarah sebagai ilmu dan seni, keterkaitan sejarah dengan ilmu lain, serta cara dalam melakukan sebuah penelitian sejarah. Tulisan yang kedua adalah *Metodologi Sejarah*, lebih menjelaskan secara spesifik tentang jenis-jenis sejarah, seperti sejarah lisan, sosial, kota, pedesaan, ekonomi, kebudayaan, wanita, agama, politik, pemikiran, biografi, kuantitatif dan sejarah mentalitas.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab. **BAB I** adalah yang secara umum yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, alasan memilih judul, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka serta sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II dipaparkan mengenai kondisi keamanan dan politik yang terjadi di Sulawesi Selatan dari tahun 1950-1980, penulisan pada Bab ini membagi dalam tiga periode, pada sub bab pertama yaitu Masa Kekacauan pada tahun 1950-1960, sub bab kedua adalah Akhir Pemberontakan dari tahun 1960-1967, dan yang terakhir adalah Zaman Baru dari tahun 1967-1980.

BAB III memaparkan tentang Perkembangan Korem 141/Toddopuli Tahun 1956-1965, penulisan pada bab ini dibagi kedalam tiga poin. Poin pertama

adalah Dari Lahir hingga Perubahan Status, poin kedua adalah Profesionalisasi Personil dan yang terakhir adalah Operasi Militer yang dilakukan oleh Korem 141/Toddopuli.

BAB IV merupakan lanjutan dari bab sebelumnya yaitu Perkembangan Korem 141/Toddopuli dari tahun 1965-1980, sub-sub bab adalah dibagi kedalam tiga bagian yaitu, yang pertama Tanggungjawab Kewilayahan, yang kedua adalah Komandan Korem 141/Toddopuli dari tahun 1965-1980, dan yang ketiga adalah Pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh Korem 141/Toddopuli.

BAB V merupakan penutup yang terbagi ke dalam dua poin yaitu, Kesimpulan dan Saran. Setelah penjabaran dari bab pertama sampai dengan bab empat, maka ditarik kesimpulan oleh penulis. Kesimpulan tersebut jawaban dari rumusan permasalahan penelitian yang telah diajukan, sekaligus merupakan penutup dari penelitian.

BAB II

KONDISI POLITIK DAN KEAMANAN DI SULAWESI SELATAN

1950-1980

Setelah Indonesia berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 17 Agustus 1950 sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda (yang dilaksanakan sejak 23 Agustus 1949), hal tersebut menjadi awal dari sejarah Republik Indonesia sebagai negara yang sepenuhnya berdaulat dan merdeka. Indonesia benar-benar merdeka, setidaknya-tidaknya dalam pengertian hukum internasional, dan kini menghadapi prospek dalam menentukan masa depannya sendiri. Dalam sebuah negara yang masih menunjukkan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi-tradisi otoriter, maka banyak yang bergantung pada kearifan dan nasib baik terhadap pemimpin Indonesia.²¹

Setelah bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi, ternyata hal tersebut bukanlah akhir dari permasalahan yang terjadi pada bangsa ini. Kelak terjadi suatu permasalahan lebih rumit lagi yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tahun 1950-an merupakan tahun percobaan demokrasi bagi bangsa Indonesia, bangsa yang baru merdeka ini harus memulai menata kehidupan dari semua aspek bidang. Seperti mulai dari pemerintahan, sistem pendidikan, politik, ekonomi dan penataan administrasi daerah.

²¹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. (Jakarta: SERAMBI, 2008), hlm. 493.

Namun, terdapat suatu permasalahan yang lebih serius dan menempati posisi pertama di antara semua permasalahan lainnya yaitu tentara. Permasalahan mengenai tentara-lah yang mendominasi sebagian besar sejarah Indonesia setelah 1950. Mereka yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan lalu meminta hak mereka setidaknya untuk diakui sebagai tentara reguler, dan persoalan yang kedua adalah terlalu banyak campur tangan para politisi terhadap tentara.

Penulisan pada bab ini akan menceritakan tentang kondisi politik dan keamanan di Sulawesi Selatan pada tahun 1950-1980. Bab ini terbagi dalam tiga periode, pada sub bab pertama yaitu Masa Kekacauan pada tahun 1950-1960, sub bab kedua adalah Akhir Pemberontakan dari tahun 1960-1967, dan yang terakhir adalah Zaman Baru dari tahun 1967-1980.

2.1. Masa Kekacauan 1950-1960

Seperti halnya daerah Sulawesi yang sangat menarik untuk dibicarakan lebih mendalam, setidaknya selama kurang lebih 20 tahun di Sulawesi telah terbentuk empat “negara” yang pernah mengakui kedaulatannya di wilayah ini, yaitu: Negara Indonesia Timur (NIT), Republik Indonesia Serikat (RIS), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Negara Islam Indonesia (NII).²²

Keberadaan golongan militer di Sulawesi berbeda dengan yang terjadi pada daerah lainnya di Indonesia yang ketika itu masih berbentuk Republik

²² Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay, “Pengantar Historiografis,” dalam Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay. (Penyunting), *Negara dan Masyarakat di Sulawesi Selatan di Tahun-Tahun 1950-an*. (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 4.

Indonesia Serikat. Penempatan Gubernur Militer di Sulawesi gagal karena masih adanya pengaruh dari Negara Indonesia Timur (NIT). Sehingga, pada daerah ini kemudian dibentuk Komisi Militer dengan ketua ialah Ir. Putuhena dan Letnan kolonel TNI A.J. Mokoginta sebagai komandan di wilayah Indonesia Timur.

Memasuki tahun 1950-an, di Sulawesi dikenal dengan daerah yang penuh gerombolan, terjadi kekacauan dimana-mana, dan masa ini dikenal juga sebagai masa-masa penuh ketakutan. Selama kurang lebih 15 tahun, perhatian pada daerah khususnya tertuju pada penyelesaian terhadap aksi pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar/Qahhar Mudzakkar, yang pada 1953 telah menyatakan diri sebagai bagian dari DI/TII.

Peristiwa yang menjadi pembuka dalam catatan sejarah daerah ini pada tahun 1950 adalah peristiwa Andi Azis. Peristiwa ini diakibatkan karena penolakan oleh Andi Azis terhadap kedatangan TNI yang berasal dari Pulau Jawa. Sekalipun terjadi peristiwa Andi Azis, dalam beberapa hal, ini justru mempermudah gerakan untuk segera membubarkan NIT pada 17 Agustus 1950. Peristiwa ini akhirnya hanya memperburuk masalah status kaum gerilyawan. Pertama-tama, kaum gerilyawan, yang sangat tersinggung oleh pelantikan Andi Azis bersama dengan pasukan KNIL-nya, sekarang merasa bahwa mereka memperoleh pembenaran untuk kecurigaan mereka semula. Lebih dari

sebelumnya mereka tersinggung oleh kenyataan bahwa musuh lama mereka dalam KNIL dapat diterima dalam APRIS sedangkan mereka tidak.²³

Sesudah dibubarkannya NIT, berbagai operasi militer yang dilakukan oleh tentara, sampai membuat gerombolan melanda daerah-daerah pedesaan di Sulawesi Selatan. Sementara di wilayah kota, kehidupan modern yang dinikmati oleh penduduk kota, utamanya penduduk muda kota, yang di antaranya ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan terus menggeliat misalkan Universitas Muslim Indonesia tahun 1953, Universitas Hasanuddin tahun 1956. Kegiatan politik sipil juga tumbuh subur sejalan dengan diselenggarakannya beberapa pemilihan langsung (pemilihan Dewan Kota dan Pemilihan Umum 1955) serta tidak langsung (Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten).²⁴

Apa yang terjadi di daerah, khususnya Sulawesi Selatan merupakan akibat dari apa yang terjadi di tingkat Nasional. Akar dari permasalahan yang terjadi pada daerah ini adalah masalah gerilya, masalah ini merupakan titik awal dari masa-masa paling sulit dalam sejarah Sulawesi Selatan.²⁵ Pada tahun 1950-an, situasi politik dan keamanan di Sulawesi Selatan merupakan masalah yang paling lama untuk mendapatkan titik terang. Persoalan pemberontakan yang berkepanjangan sulit untuk diatasi, bukan karena kuatnya para pemberontak, melainkan besar adanya persoalan di tubuh Angkatan Darat sendiri, antara pusat

²³ Barbara Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari Tradisi ke DI/TII*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989 b), hlm. 171.

²⁴ Dias Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an," dalam Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay. (Penyunting), *op.cit.*, hlm. 11.

²⁵ Christian Pelras, *Manusia Bugis*. (Jakarta: NALAR, 2006), hlm. 334.

dan daerah, antara masalah kesukuan yang menjadi pemimpin, persoalan jabatan dan saling kecurigaan terhadap tentara satu ke tentara yang lainnya.

Sebagai negara yang baru merdeka, hendaknya untuk mengatur sistem kenegaraan, di samping munculnya permasalahan keamanan, untuk lebih mengatur sistem pemerintahan, Indonesia juga telah mengatur mengenai administratif wilayah. Seperti halnya di daerah Sulawesi Selatan, telah dibentuk tujuh daerah Swatantra atau daerah otonom sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1952. Setidaknya, sebelum pemilihan umum pada 1955 dilaksanakan di Sulawesi, yaitu di Makassar, telah dilaksanakan pemilihan Dewan Kota Makassar.

Pada tahun 1950-an, daerah ini bisa dikatakan sebagai masa penuh ketakutan, dengan makin meluasnya pemberontakan dan aksi militer membuat banyak aktifitas masyarakat yang jadi terganggu, khususnya bagi mereka yang berada di luar kota. Hal itu menjadi lebih serius ketika Kahar Muzakkar menjadi bagian dari DI/TII yang di Proklamasikan pada 7 Agustus 1953 di Enrekang, mereka mulai merorientasikan Syariat Islam di wilayah ini, mulai dari menarik pajak atas nama Negara Islam, penerapan Hukum Islam secara ketat di wilayah kekuasaan mereka di Sulawesi Selatan, serta juga melakukan kebijakan seperti kepemilikan tanah (*Landreform*), penghapusan ketidakadilan sosial, pelarangan gaya hidup mewah seperti memakai emas, perhiasan dan sutra atau pesta pernikahan yang berlebih-lebihan. Kebijakan lain mereka adalah penghapusan

terhadap sisa-sisa feodalisme, termasuk pemerintahan tradisional dan gelar kebangsawanan, serta pelarangan terhadap “kepercayaan tradisional”.²⁶

Masyarakat pun akhirnya dibuat bingung pada saat itu. Ketika mereka pro terhadap pemberontak, maka mereka akan ditangkap oleh tentara pemerintah (Tentara Kota), dan lebih seriusnya mereka akan dianggap sebagai partisipan pemberontak, dan apabila mereka pro terhadap tentara pemerintah, maka mereka akan dibunuh, rumahnya dibakar, atau diperkosa oleh para pemberontak. Dengan adanya ketakutan ini, maka jalan satu-satunya hanyalah meninggalkan kampung halamannya di pedesaan atau mengungsikan diri ke kota-kota besar seperti Kota Makassar.

Jika di tahun 1930 penduduk kota adalah sedikit di atas 84 ribu orang, maka di tahun 1961, penduduk kota sudah menjadi lebih dari 384 ribu, hal ini berarti selama 30 tahun, Makassar mendapatkan tambahan 300 ribu jiwa atau tumbuh dengan laju hampir 5% per-tahunnya dengan kata lain, dalam rentang waktu tersebut, penduduk Kota Makassar berlipat hampir 5 kali.²⁷ Menurut data yang diperoleh, kelompok migran yang paling banyak masuk ke Kota Makassar adalah mereka yang berasal dari daerah Sulawesi sendiri misalkan dari Toraja, Luwu, Bone dan daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 336.

²⁷ Dias Pradadimara, “Dari Makassar ke Makassar: Proses “Etnisasi” Sebuah Kota,” dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy. (Penyunting), *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 194.

Mereka berharap supaya hidup mereka terjamin dari gangguan keamanan, maka muncullah permasalahan yang lainnya. Jika di desa permasalahannya merupakan masalah gerombolan dan aksi militer, maka di kota muncul permasalahan yaitu kedatangan para migran atau pengungsi. Fasilitas kota yang dibangun untuk kapasitas di tahun 1930-an, jelas tidak lagi mampu menopang jumlah migran yang terus masuk dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang tajam. Kondisi ekonomi yang memburuk hingga akhir 1960-an dan kondisi politik nasional yang juga tidak menentu, membuat keadaan semakin runyam.²⁸ Selain itu, pemerintah tentunya harus memikirkan kehidupan para migran tersebut. Menetap di kota tentunya mereka ingin bertahan hidup sampai kondisi di daerahnya benar-benar terjamin, sehingga daripada itu, mereka setidaknya membutuhkan pekerjaan untuk bisa bertahan hidup, terkecuali jika mereka mempunyai sanak saudara di kota. Karena kondisi ekonomi dan politik pada saat itu yang kacau, maka tentunya pekerjaan akan sulit untuk didapatkan. Sehingga besar kemungkinan bagi mereka untuk melakukan segala cara yang tidak wajar, misalkan mencuri, untuk terus bisa tetap bertahan hidup di kota.

Selain dari adanya kesibukan di daerah ini untuk segera mengakhiri kekacauan yang ditimbulkan oleh para pemberotak, mulai dari melakukan perundingan, sampai melakukan operasi yang dilakukan oleh tentara, ternyata kondisi politik di kalangan militer nampaknya juga mengalami kekacauan. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan nasional sampai kepada perbedaan ideologi di antara para perwira. Harus digarisbawahi bahwa sebagian besar yang menjadi

²⁸ *Ibid.*, hlm. 198.

pemicu dari timbulnya pemberontakan di daerah, khususnya Sulawesi Selatan, diakibatkan oleh kebijakan dari MBAD, yang ketika itu yang menjadi KSAD adalah A.H. Nasution.

Hal yang kemudian menjadi puncak kekacauan di tubuh Angkatan Darat sendiri adalah ketika terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 di Jakarta, peristiwa ini sangat berdampak besar terhadap kalangan Angkatan Darat. Awalnya bermula dari upaya sahabat lama Kahar, yakni Kolonel Bambang Supeno untuk menggeser kedudukan Kolonel Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.²⁹ Hal yang dilakukan oleh Bambang Supeno nampaknya mendapat dukungan dari Presiden dan Parlemen terhadap akan profesionalisme tidak sesuai dengan kepentingan Militer Indonesia. Dengan adanya campur tangan Parlemen terhadap Angkatan Darat, maka pada 17 Oktober, Pimpinan Angkatan Darat mencoba untuk meyakinkan Ir. Soekarno dengan menggerakkan suatu demonstrasi dan pertemuan dengan tujuh belas perwira senior Angkatan Darat, serta kekuatan sepenuhnya dengan mengepung Istana Presiden menggunakan Tank dan Moncong Meriam guna menuntut pembubaran parlemen. Presiden Ir. Soekarno menolak untuk melakukannya, yang membuat Pimpinan Angkatan Darat kemudian mundur.³⁰ Pada tanggal 5 Desember, KSAD Nasution diberhentikan dan pada tanggal 16 Desember, Kolonel Bambang Sugeng diangkat menjadi pejabat Kepala Staf Angkatan Darat.³¹

²⁹ Barbara Harvey, *op.cit.*, hlm. 213.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 214.

³¹ *Ibid.*, hlm. 222.

Peristiwa 17 Oktober 1952 di Jakarta tersebut sangat berdampak pada tubuh Angkatan Darat, karena adanya peristiwa ini, muncullah dualisme di kalangan para tentara, ada yang pro-17 Oktober dan ada yang Pro-terhadap Presiden. Tentunya peristiwa ini berpihak kepada mereka yang Pro-Presiden, pergantian besar-besaran terhadap tubuh Angkatan Darat, mereka yang Pro-17 Oktober diganti menjadi komandan oleh mereka yang pro-Presiden.

Seperti hal pada Tentara Teritorial-VII (TT-VII), dengan adanya peristiwa 17 Oktober 1952, maka komandannya juga diganti. Pada saat itu, Kolonel Gatot Subroto sebagai panglima TT-VII, digantikan oleh Joop F. Warouw. Peristiwa ini bisa dikatakan sebagai kudeta "mulus". Selain dari itu, dengan adanya pro-kontra terhadap peristiwa 17 Oktober, di Sulawesi Selatan terjadi juga pertempuran antara Batalyon 711 (tadinya Batalyon Abdullah) dan Batalyon 719 milik Andi Selle. Pertempuran ini terjadi di dekat Parepare dan Enrekang, yang akhirnya mengalami penyelesaian secara damai.

Setelah Warouw menjadi panglima TT-VII, hal ini justru semakin meningkatkan pengaruh penguasaan militer oleh orang-orang Minahasa di Sulawesi Selatan. Seperti yang dikatakan oleh Harvey, bahwa hasil lebih lanjut dari pendongkelan Gatot oleh Warouw adalah pengetatan orang-orang Minahasa atas TT-VII. Tidak hanya posisi staf di dalam Markas TT-VII yang diduduki oleh orang-orang Minahasa, tetapi juga beberapa perwira dari utara ditugasi untuk menempati jabatan-jabatan dalam batalyon-batalyon bekas CTN, yang

sebelumnya dianggap sebagai bidang yang khusus diperuntukkan bagi para komandan mereka sendiri.³²

Di tengah-tengah persoalan pemberontak, perebutan kekuasaan dan permasalahan yang terjadi pada TT-VII, pada tahun 1950-an, ada satu hal unik yang terjadi saat itu, yaitu Pemilihan Umum 1955 yang merupakan pemilihan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemilihan anggota Konstituante (Dewan yang dipilih oleh rakyat untuk menyusun Undang-Undang baru yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950). Menurut beberapa peneliti, seperti yang dikatakan oleh Burhaman Djunedding, bahwa pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang sangat demokratis, bersih, jujur dan adil. Bahkan misalnya yang dikatakan oleh Harbert Feith, bahwa hanya ada satu dari tujuh pemilu yang pernah diselenggarakan di Indonesia berjalan secara demokratis, LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia), serta JURDIL (jujur dan adil) adalah Pemilihan Umum 1955.³³

Pemilu tahun 1955 dilaksanakan di tengah-tengah pergolakan di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. Banyak para peneliti mengatakan bahwa pemilu 1955 yang paling demokratis, tetapi itu masih perlu diuji, khususnya di daerah ini dengan makin meluasnya kekuasaan Kahar, sehingga dapat membuat masyarakat takut untuk berpartisipasi dalam pemilu ini, terkecuali Kahar memiliki peranan dalam pemilu. Karena ada beberapa hal

³² *Ibid.*, hlm. 236.

³³ Burhaman Djunedding, "Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan," dalam Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay. (Penyunting), *op.cit.*, hlm. 134.

pendukung, diantaranya ialah hasil pemilu 1955, yang memiliki suara terbanyak adalah Partai Masyumi, yang menurut Harvey ialah bahwa partai ini banyak mendukung gerakan Kahar serta pada awal tahun 1956, merupakan puncak kekuasaan dari Kahar di Sulawesi Selatan.

Pada bulan Oktober 1955, Nasution kembali diangkat menjadi KSAD. Nasution pun membawa misi baru di kalangan para Tentara Angkatan Darat, meskipun hal ini beberapa tahun lagi akan tercapai, dengan kembalinya Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, membawa angin segar terhadap para perwira Sulawesi Selatan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti memiliki pro dan kontra, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti perekrutan menjadi Tentara Nasional sampai meletusnya peristiwa 17 Oktober 1952 di Jakarta. Seperti halnya pada tahun-tahun ini, Nasution membawa misi dengan program reorganisasi teritorial, serah terima panglima-panglima daerah, penguatan pengawasan pusat atas program pendidikan dan latihan serta pembentukan kekuatan penggempur di bawah kontrol Markas Besar Angkatan DARAT (MBAD).³⁴

Hal paling terpenting juga adalah memperkecil wilayah komando, yang pada awalnya tujuh komando wilayah teritorial di seluruh Indonesia, akan dibentuk tujuh belas Komando Daerah Militer (KDM). Dari beberapa kebijakan yang dibawa oleh Nasution, nampaknya hal tersebut ditolak oleh para perwira dari Minahasa, seperti Sumual yang menjadi panglima TT-VII saat itu yang

³⁴ Barbara Harvey, *op.cit.*, hlm. 238.

mengantikan Warouw. Hal yang sangat terlihat jelas pada penolakan ini adalah ketika Sumual kelak mendeklarasikan Permesta pada 2 Maret 1957.

Sebelum pembentukan Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan Tenggara (KDMSST) pada 29 Mei 1957, awalnya telah dibentuk Komando Daerah Pertempuran Sulawesi Selatan Tenggara (Ko DPSST) pada 15 Juli 1956, yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman dari Divisi Brawijaya untuk menyelesaikan kekacauan yang ada di daerah ini. Namun, permasalahan pun bertambah rumit karena awalnya pembentukan satuan ini merupakan permintaan dari para perwira lokal di Sulawesi Selatan. Tetapi dalam pelaksanaannya, yang ditunjuk sebagai komandan adalah bukan dari kalangan mereka. Sehingga, dibentuklah Komando Reserve Umum Hasanuddin (KRU Hasanuddin) oleh Mayor Inf. M. Yusuf pada 5 Oktober, satuan ini memiliki 7 Batalyon yang semua komandan batalyonnya adalah para perwira lokal di Sulawesi Selatan.

Kodam XIV/Hasanuddin yang awalnya bernama Komandan Daerah Militer Sulawesi Selatan Tenggara (KDMSST) dibentuk di tengah terjadinya kemelut serta pergolakan politik, ekonomi, sosial dan budaya di seluruh Indonesia yang diwarnai oleh adanya kontradiksi-kontradiksi menuju pada perpecahan keutuhan nasional. Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, termasuk salah satu daerah yang cukup jauh terlibat dalam kemelut yang demikian, yang akibatnya telah menjerumuskan daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara pada situasi kekacauan yang terus berlarut-larut.³⁵ Melalui Surat Keputusan KSAD Nomor:

³⁵ JARAH DAM XIV/Hasanuddin, *25 Tahun Kodam XIV Hasanuddin 1957-1982*. (Ujung Pandang: JARAH DAM XIV Hasanuddin, 1982), hlm. 285.

246/5/1957 tertanggal 29 Mei 1957, Letnan Kolonel Inf. Andi Mattalatta diangkat sebagai pejabat Komandan dan Mayor CPM Haeruddin Tasning sebagai pejabat Kepala Staf KDMSST. Peresmian terbentuknya KDMSST tertanggal 1 Juni 1957.³⁶ Selain itu, untuk lebih mempermudah langkah Kodam dalam mengamankan daerah Sulawesi Selatan dari para pengacau, maka dibentuklah satuan-satuan tempur yang nantinya akan melaksanakan sejumlah operasi militer.

Hal yang menjadi keinginan selama ini dari para perwira akhirnya bisa tercapai. Ketika pada tahun-tahun sebelumnya yang menjadi pemimpin di daerah ini merupakan orang-orang dari Minahasa ataupun dari Jawa, maka sekarang orang setempatlah yang memimpin. Apa yang telah diharapkan oleh Kahar Muzakkar pada masa revolusi, akhirnya bisa tercapai, namun dengan suasana yang berbeda.

Menjelang akhir 1958, anak daerah Sulawesi Selatan telah mengambil alih jabatan tertinggi Sipil dan Militer di daerahnya dalam pembentukan KoDPSST, dan untuk membentuk KDMSST, telah menempatkan untuk pertama kalinya orang-orang dari Sulawesi Selatan guna bertanggungjawab pada keamanan intern di daerah itu, baik untuk operasi-operasi militer maupun untuk perundingan dengan Kahar Muzakkar.³⁷

³⁶ Radik Djarwada cs, *Corps Hasanuddin "Pradjurit Tempur dan Pembangunan"*. (Ujung Pandang: Sekretaris Djenderal "Corhas", 1972), hlm. 116.

³⁷ Barbara Harvey, *op.cit.*, hlm. 287.

Tetapi itu semua tidak menyelesaikan persoalan terhadap Kahar, dengan adanya penarikan mundur terhadap pasukan-pasukan dari Brawijaya dan Diponegoro itu telah membuat meluasnya kekuasaan DI/TII. Dalam bulan Februari 1958, terdapat laporan-laporan bahwa Kahar telah meningkatkan kegiatannya di dekat Makassar dan Malino sejak bulan Desember, dengan dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut.³⁸ Namun itu tidak berlangsung lama ketika pemberontak Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR) dan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dimasukkan ke dalam Resimen-resimen di bawah TNI pada tahun 1956, dan paling membuat Kahar terdesak ialah ketika Bahar Mattalioe kembali ke pangkuan NKRI pada tahun 1959.

2.2. Akhir Pemberontakan 1960-1967

Pada awal tahun 1960, kedudukan Kahar Muzakkar sudah sangat terjepit, apalagi setelah Bahar Mattalioe menyerahkan diri dan kembali kepada pangkuan NKRI. Untuk menghindari adanya pertempuran bersenjata antara TNI dan pasukan Kahar, maka Kodam-SST telah melakukan perundingan dengan Kahar. Dengan adanya informasi bahwa Kahar bersedia untuk berunding, maka hal ini mendapatkan tanggapan positif dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah terus-menerus berusaha untuk mencari jalan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, namun Kahar tetap mengajukan persyaratan yang tidak mungkin diterima oleh pihak pemerintah.³⁹ Panglima Kodam-SST yaitu Letnan Kolonel Inf. M.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 292.

³⁹ Menurut sumber Angkatan Darat Indonesia, pada tanggal 1 Januari 1962, Kahar telah mengajukan tuntutan tambahan, yaitu: supaya dijadikan komando operasi untuk pembebasan Irian

Yusuf telah melakukan pertemuan dua kali dengan pihak Kahar di Bone Pute. Pertemuan pertama tanggal 21 Oktober 1961 dan pertemuan kedua pada 12 November 1961, namun penyelesaian akhir tidak pernah tercapai.

Kesabaran M. Yusuf terhadap Kahar nampaknya telah habis. Sudah dilakukan beberapa kali perundingan untuk mencapai jalan damai, tetapi M. Yusuf merasa dirinya dipermainkan oleh sikap Kahar yang telah mengajukan beberapa persyaratan yang tidak mungkin diterimanya. Sehingga, pada tanggal 28 Oktober 1962, M. Yusuf dalam pidatonya mengatakan bahwa kahar dan pasukannya harus segera ditangkap.

Dalam tubuh Angkatan Darat telah terjadi pergantian KSAD, Achmad Yani telah menggantikan kedudukan Nasution sebagai KSAD. Achmad Yani mengatakan bahwa tidak akan ada lagi kompromi terhadap pemberontak di Sulawesi Selatan. Dilancarkanlah operasi penuh terhadap pemberontak. Hal yang menarik dalam proses operasi untuk memadamkan pemberontakan Kahar, ialah terjadi permasalahan yang lain, yaitu Peristiwa Pinrang. Andi Selle telah dicurigai banyak membantu Kahar dalam menghalangi operasi yang dilakukan oleh TNI, hingga akhirnya pada tanggal 05 April 1964, Yusuf Amir pergi ke Pinrang untuk meyakinkan Andi Selle agar tidak menghalangi operasi militer yang ketika itu

Barat yang telah diperintahkan Soekarno bulan Desember 1961, supaya ia diberi wewenang penuh untuk memutuskan apakah sebaiknya berunding atau bertempur untuk pengembalian Irian Barat, supaya ia diberi wewenang penuh untuk membatasi atau mengurangi jumlah pasukan ALRI di Indonesia Timur dan jumlah pasukan TNI dari luar daerah, supaya ia diberi wewenang untuk melarang kegiatan Komunis dan mengusir pasukan TNI Komunis dari Indonesia Timur, dan supaya Divisi Momoc Ansharullah-nya diresmikan dengan kekuatan penuh (18 Batalyon). Lihat dalam Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappangara. (Penyunting), *Sejarah Sulawesi Selatan: Jilid 2*. (Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2005), hlm. 314-315.

sedang dilancarkan terhadap Kahar Muzakkar dan pasukannya.⁴⁰ Dalam pertemuan ini, cukup mengejutkan bagi M. Yusuf, karena dalam perjalanan tiba-tiba mereka dicegat oleh beberapa pasukan yang dicurigai sebagai bagian dari Andi Selle, dan tidak dipungkiri baku tembak terjadi, dan M. Yusuf berhasil selamat dari peristiwa ini.

Operasi terhadap Kahar Muzakkar terus dilakukan sehingga untuk lebih mempermudah langkah untuk menyelesaikan pemberontakan, M. Yusuf meminta bantuan dari divisi lain, seperti Divisi Siliwangi Jawa Barat, dibawah Komandan Solihin. Atas permintaan Yusuf Amir, maka pada tanggal 28 Oktober 1963, telah tiba di Parepare tiga Batalyon Divisi Siliwangi. Pada tanggal 26 Februari 1964, suatu batalyon tambahan (330/Kujang) menggabungkan diri, secara khusus Yusuf Amir meminta Solihin (dari Divisi Siliwangi) untuk menjadi kepala stafnya sekaligus untuk menjadi komandan operasi. Sejak itulah, Solihin memusatkan perhatian operasinya terhadap Kahar Muzakkar. Kurang dari setahun kemudian (1965), Batalyon 330/Kujang berhasil mengisolasi Kahar Muzakkar di dekat Sungai Lasolo, Sulawesi Tenggara. Dikabarkan bahwa pada saat itu, Kahar Muzakkar telah “ditembak mati” pada bulan 3 Februari 1965.⁴¹

Sejak 1953 sampai dengan tertembak matinya Kahar Muzakkar pada 2 Februari 1965, perkembangan militer tampak mempunyai dampak yang demikian

⁴⁰ Abd. Latif, “Dinamika Lokal Militer di Sulawesi Selatan,” dalam Edward L. Poelinggomang, Suriadi Mappangara. (Penyunting), *Dunia Militer di Indonesia: Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hlm. 253.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 255.

besar di dalam kehidupan masyarakat. Militer telah berkembang sebagai kekuatan khas ditengah-tengah masyarakat. Di lingkungan organisasi tentara sangat dipengaruhi oleh gerakan gerombolan. Misalnya pergantian pimpinan tentara di Sulawesi Selatan tidaklah dilakukan secara yang lazim, sesuai dengan mereka mampu atau tidak dalam melakukan penyelesaian kekacauan.

Selain fokus terhadap penyelesaian kekacauan yang dilakukan oleh tentara, Sulawesi Selatan terus meningkatkan sistem administratifnya. Satu hal yang sangat penting yang memiliki dampak sosial dan politik adalah bahwa pembentukan daerah di tahun 1957 dan 1959 tidak hanya melahirkan “Daerah” sebagai satu pemerintahan yang otonom (yang memiliki dewan perwakilan), tetapi sebagai akibatnya penghapusan Swapraja sebagai satu sistem pemerintahan yang diakui keabsahannya. Sejak 1957 dan terlebih lagi sejak 1959, Swapraja telah dihapuskan di Sulawesi Selatan.⁴²

“Puncak” pematangan struktur pemerintahan negara di daerah seolah dicapai dengan dibentuknya Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara berdasarkan PP 5 1960 pada tanggal 31 Maret 1960 dan dibentuknya Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (sebagai daerah otonom) berdasarkan Perpu 47 tahun 1960 tanggal 13 Desember 1960. Setelah hampir 9 tahun tidak ada pemerintah daerah yang cakupan wilayahnya seluruh Sulawesi Selatan, akhirnya dibentuk lagi daerah otonom dan DPRD-nya akan segera disusun. Pada tanggal 20 April 1960, Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya dibentuk. Letnan Kolonel A. Rivai ditunjuk sebagai

⁴² Dias Pradadimara, “Kronika Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an,” dalam Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay. (Penyunting), *op.cit.*, hlm. 25.

gubernur. Dengan demikian, penataan ulang “Negara” ditingkat Provinsi bisa dikatakan selesai dan peranan “anak daerah” menjadi sangat menonjol.⁴³

Permulaan tahun 1960 merupakan awal dari penguasaan militer, yang pada posisi pejabat-pejabat pemerintahan diduduki oleh golongan militer, misalnya Gubernur Sulawesi Selatan dari kalangan Militer, begitupun pada daerah tingkat II seperti Walikota Makassar dan Walikota Parepare. Seperti hal yang baru diterapkan, pastinya membutuhkan waktu untuk menjadikannya berjalan dengan baik, struktur pemerintahan yang baru, bahkan yang lebih rendah belum berjalan dengan baik.

Banyaknya keterlibatan militer dalam dunia pemerintahan, hal ini sangat menguntungkan bagi Militer pada daerah ini, karena beberapa faktor. Pertama, harmonisasi hubungan antara militer (baca=Kelaskaran, kemudian Tentara) dengan kalangan bangsawan (baca=kalangan sipil) yang terbangun sejak awal revolusi tidak pernah mengalami gangguan yang berarti. Kedua, pembentukan KoDPSST pada tahun 1956 membuka peluang yang berarti bagi perwira-perwira Bugis dan Makassar untuk mengisi posisi-posisi penting dalam jajaran militer. Umumnya perwira-perwira ini berstatus sosial sebagai anggota bangsawan, bahkan punya hubungan kekerabatan dengan pejabat-pejabat sipil. Ketiga, sejak upaya penumpasan Permesta pada tahun 1957, hingga kampanye merebut Irian Barat pada tahun 1962, praktis Komando Militer di daerah ini tidak hanya

⁴³ *Ibid.*, hlm. 26.

mengurangi masalah-masalah militer, tetapi kedua tujuan itu “terpaksa” militer harus mengendalikan insitinsi-insitinsi sipil setempat.⁴⁴

Selesainya persoalan Kahar Muzakkar, penataan administratif daerah telah dilakukan, maka muncullah persolan yang baru di pusat yang sangat berpengaruh terhadap yang terjadi di daerah. Persoalan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Tentara memuncak pada tahun 1965. PKI merupakan musuh tentara sejak masa revolusi. Sejak kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, konflik ideologi di Indonesia semakin meningkat, sebagai implikasi dari gagasan Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin dan pentingnya kerja sama nasional, agama, dan komunis (NASAKOM). Konsepsi itu ditentang beberapa tokoh politik dan militer, yang melahirkan pertarungan ideologi dan politik yang sangat dramatis.⁴⁵ Di Sulawesi Selatan sendiri persoalan dengan PKI cukup mencuat ke publik. Pada tahun 1960, Yusuf Amir sebagai panglima Kodam-SST melarang aktifitas PKI dalam wilayah kekuasaannya, tetapi hal tersebut dicabut karena tekanan dari Presiden Soekarno, meskipun dalam kenyataannya masih ada batasan terhadap PKI.

Semakin memanasnya di tingkat Nasional yang notabene Soekarno dengan konsep NASAKOM-nya yang dianggap lebih berpihak terhadap PKI, terlihat bahwa PKI dimasukkan ke dalam kabinet dan hal inilah yang sangat ditentang oleh tentara. Konflik ideologi NASAKOM semakin meningkat. Bahkan pada

⁴⁴ Abd. Latif, “Dinamika Lokal Militer di Sulawesi Selatan,” dalam Edward L. Poelingomang dan Suriadi Mappangara. (Penyunting), *op.cit.*, hlm. 261.

⁴⁵Anmar Arifin, *Pergulatan Politik di Makassar*. (Ciputat: Pustaka irVan, 2019), hlm. 212.

tanggal 1 Oktober 1965, pimpinan sementara Angkatan Darat R.I mengeluarkan pengumuman (Nomor 27/PENG/PUS/1965) yang menyebut terjadinya gerakan *kontra revolusioner* yang menamakan diri “Gerakan 30 September” di Jakarta. Peristiwa yang dituding didalangi oleh PKI itu, memicu timbulnya aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa, pemuda, dan pelajar di kota-kota Universitas, termasuk di Makassar.⁴⁶ Kabar mengenai penculikan dan pembunuhan jenderal masih dipahami sebagai sebatas isu politik yang belum jelas di Makassar. Pemberitaan lokal pun tidak menunjukkan adanya Gerakan 30 September di Jakarta. Namun, sudah ada tanda-tanda ketidakberesan dalam wilayah Makassar, aktivitas para Tentara dan petugas mondar-mandir di jalanan untuk mengamankan situasi.⁴⁷ Tetapi gerakan ini mulai terjadi beberapa hari ke depan yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa. Seperti yang terjadi di Jakarta, memunculkan aksi di daerah, terjadilah penculikan orang-orang PKI hingga sampai pembantaian terhadap mereka. Misalkan yang terjadi di Bone, terjadi pembantaian terhadap orang-orang PKI yang diperkirakan berjumlah 200 orang. Dari wawancara dengan Anwar Abbas, Taufik dalam *Kamp Pengasingan Moncongloe* menyebut: “pembunuhan terjadi di penjara Kodim Watampone, kurang lebih ratusan orang sipil yang berasal dari Jawa. Mereka umumnya karyawan pabrik gula Arasoe.”⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

⁴⁷ Amri Novriadi Haruna. (Skripsi), *Penangkapan Anggota PKI dan Simpatisannya di Makassar Tahun 1965-1966*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019), hlm. 4.

⁴⁸ Taufik, *Kamp Pengasingan Moncongloe*. (Depok: DESANTARA, 2009), hlm. 114.

Selain di Bone, di Makassar pun terjadi pembasmian terhadap PKI. Hal ini karena orang Jawa dan Tionghoa (Cina) dianggap identik dengan PKI, sehingga terjadi penyerangan terhadap mereka. “Pemuka Kristen Protestan Sulawesi yang tiba di Jakarta, hari ini melaporkan bahwa 90% toko-toko Tionghoa di Makassar diserang dan isinya dihancurkan pada 10 November 1965, yang hampir melibatkan seluruh penghuni kota. Menurut catatan Taufik dalam *Kamp Pengasingan Moncongloe* (2009) dalam kerusuhan di Makassar pada 10 Oktober itu, melibatkan pihak ketiga yang punya kepentingan tambahan selain pembasmian terhadap PKI. “Aksi berubah menjadi penjarahan terhadap harta-benda milik orang-orang Tionghoa dan penghancuran rumah orang Jawa,” tulis Taufik.⁴⁹

Nampaknya, sudah jelas yang menjadi pemenang dalam pertandingan politik ini adalah Angkatan Darat. Kegagalan kudeta Gerakan 30 September (G 30 S), membuat situasi politik nasional berubah drastis dan perkembangan tanpa arah pun terjadi. Berbagai kepentingan mulai saling berbenturan. Konflik kemudian terpolarisasi antara praksi Presiden Soekarno dan Angkatan Darat yang diwakili oleh Soeharto. Bagaikan bola salju, konflik ini kemudian menjadi semakin besar, hingga puncaknya adalah lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar),

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 112.

yang mengukuhkan kekuatan politik Soeharto, dan sebaliknya justru melemahkan posisi Soekarno.⁵⁰

2.3. Zaman Baru 1967-1980

Setelah tahun 1965, Indonesia memasuki suatu tahapan baru dalam perkembangannya. Untuk membedakan antara masa pemerintahan sebelumnya, Soeharto dan sekutunya menamakannya sebagai masa “Orde Baru” dan sebelumnya dikatakan sebagai masa “Orde Lama”. Beberapa tahun terakhir, PKI dihancurkan secara fisik dalam ledakan kekerasan politik yang paling hebat semenjak revolusi. Pada awal tahun 1967, Soeharto merasa bahwa langkah simbolis terakhir dalam mengkonsolidasikan Orde Baru dapat diambil: penyingkiran Soekarno. Pada bulan Maret 1967, Majelis bersidang, membebaskan Soekarno dari semua kekuasaan dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden.⁵¹ Jika pada tahun 1945-1965, bangsa Indonesia terfokus dalam pengamanan, maka pada masa Orde Baru, pemerintah lebih terfokus kepada pembangunan, memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Orde Baru memang mampu membangun ekonomi nasional, dan mungkin itu semua berkaitan dengan nama kabinet yang dibuat pada masa Orde Baru, yaitu Kabinet Pembangunan yang dimulai pada tahun 1968. Sayangnya, hal itu pun juga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat pribumi. Dengan makin

⁵⁰ Saleh As’ad Djamhari, “Lahirnya Orde Baru,” dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lopian. (Penyunting), *Indonesia dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi, Jilid 8*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), hlm. 3.

⁵¹ M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 433.

banyaknya korupsi, harga naik, dan pembagunan ekonomi nasional yang bertumpu pada perusahaan asing, maka pada tahun 1967, terjadilah demonstrasi mahasiswa yang menuntut penurunan harga dan korupsi, serta pada tahun 1974, terjadi peristiwa “Malari” (Malapetaka Lima Belas Januari)⁵² .

Pada masa Orde Baru, kekuasaan militer semakin kongkrit, setelah mereka berhasil memenangkan pertarungan politik, yang ditandai dengan naiknya Soeharto menjadi Presiden. Sejak tahun-tahun ini, mulai dari tingkat tertinggi struktur pemerintahan daerah, dari gubernur sampai pada tingkat kabupaten/kotamadya diduduki dari golongan militer, meskipun sebenarnya dari tahun 1960 telah terjadi, tapi pada tahun ini kekuasaan militer semakin bertambah kuat. Pada tahun 1968, 17 dari 25 provinsi diperintah oleh perwira militer, sedangkan pada tahun 1969, lebih dari setengah dari keseluruhan bupati dan walikota adalah golongan militer.⁵³ Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Achmad Lamo, Walikota Makassar H.M. Daeng Patompo, Bupati Maros Letnan Kolonel. H.M. Kasim Daeng Marale, semuanya dari kalangan militer. Kekuatan militer semakin tidak ada tandingannya ketika Soeharto menjadi Presiden periode lima tahun yang ditetapkan dalam sidang MPRS pada Bulan Maret 1968, pembentukan kabinet meski banyak orang-orang sipil daripada militer didalamnya, namun keputusan strategis berada pada militer.

⁵² “Malari” (Malapetaka Lima Belas Januari) yang terjadi pada 1974, merupakan aksi mahasiswa terhadap kebijakan luar negeri pada masa Orde Baru. Aksi tersebut terjadi pada saat kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei, ke Jakarta. Dalam aksi ini, para demonstran melakukan pembakaran dan perampokan terhadap toko yang menjual produk-produk Jepang. *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 610.

Pada masa Orde Baru, Indonesia masih tetap menghadapi masalah keamanan di seluruh wilayah, tetapi jumlahnya tidak banyak dan dapat segera diselesaikan dengan cepat. Tingkat keamanan di Sulawesi Selatan sejak terbunuhnya Kahar Muzakkar dan penyelesaian terhadap Komunisme, tampaknya keamanan daerah ini belum stabil juga. Meskipun Kahar telah terbunuh, tetapi masih terdapat sisa-sisa pengikut Kahar yang masih berkeliaran. Sehingga, operasi militer di Sulawesi Selatan masih terus dilakukan hingga sampai pada tahun 1967.

Dalam tubuh militer terus dilakukan penyempurnaan. Pada tahun 1969-70, para komandan keempat angkatan diganti dengan kepala-kepala staf dan kekuasaan Departemen Pertahanan Keamanan terhadap komandan-komandan regional dan semua angkatan bersenjata ditingkatkan.⁵⁴ Semua yang dipilih adalah mereka yang pro-Soeharto, dan salah satu jalan agar keberadaan Soeharto tidak mendapat saingan oleh para perwira lainnya adalah pada bulan Oktober 1970, Soeharto menurunkan usia pensiun para perwira menjadi 48 tahun dan pada saat itu, 86 Jenderal akan pensiun dalam dua tahun ke depan.

Pada tahun 1970, pemerintah tampaknya telah siap melaksanakan pemilihan umum yang tertunda. Pada November 1969, DPR-GR menetapkan keanggotaan dari parlemen yang baru (DPR). DPR terdiri 360 anggota yang dipilih, ditambah seratus anggota yang diangkat. Seluruh anggota parlemen ini menjadi bagian dari 920 anggota MPR bersama-sama dengan 270 militer dan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 164.

anggota golongan fungsional yang dipilih oleh presiden, 131 anggota dipilih oleh DPRD, 112 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum, dan 10 anggota dipilih dari partai-partai yang kurang berhasil.⁵⁵ Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa semua pegawai pemerintah harus setia kepada pemerintah, dilarang bergabung pada partai politik yang lain, kecuali Golkar (Golongan Karya).⁵⁶ Sehingga, tidak mengherankan jika pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1971 dan pemilihan umum selanjutnya yang berhasil menjadi pemenang adalah Partai Golkar.

Seperti halnya yang terjadi di Sulawesi Selatan, pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada 3 Juli 1971 tentang Pemilihan DPRD, Partai Golkar mendapatkan kursi terbanyak, Golkar 30 kursi, Fraksi ABRI 5 kursi, dan Fraksi PPP 5 Kursi, dan yang menjadi Ketua DPRD dari golongan Golkar/ABRI yaitu Kolonel. Purn. AR. Manji. Pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 tentang Pemilihan DPRD, Golkar kembali menjadi pemenang dan mendapatkan 29 kursi, Fraksi ABRI 6 kursi, dan Fraksi PPP 4 kursi dan yang menjadi ketua DPRD-nya adalah dari Golkar/ABRI yaitu Abdul Latif.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 615.

⁵⁶ Golkar atau “Golongan Karya,” merupakan partai yang didirikan oleh tentara pada tahun 1964 untuk mempererat hubungan kerja sama antara tentara dan sipil. Sebelum Presiden Soeharto memilih Golkar sebagai kendaraan politiknya untuk memenangkan Pemilu 1971 dan pemilu selanjutnya, ada beberapa opsi partai yang telah dibahas, yaitu Partai Parmusi dan PNI atau keduanya. Lihat dalam Mohtar Mas’oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1977*. (Jakarta: LP3ES, 1989),

⁵⁷ Pemda TK.I Sulawesi Selatan, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*. (Ujung Pandang: Pemda TK.I Sulawesi Selatan, 1991), hlm. 529-532.

Pada bulan September 1971 di Sulawesi Selatan, terjadi perubahan nama ibukota dari Makassar ke Ujung Pandang.⁵⁸ Pergantian nama dari Makassar ke Ujung Pandang sebenarnya telah lama diusulkan sejak 1964 dan baru dapat dilaksanakan pada September 1971.

Di masa Orde Baru yang sangat menjadi sorotan adalah Dwifungsi ABRI, hingga mencapai puncak protesnya pada tahun 1998 dan merupakan tuntutan berat para demonstran pada waktu itu. Dwifungsi ABRI merupakan suatu peran ganda yang dimiliki oleh ABRI sebagai alat pertahanan negara dan sebagai kekuatan sosial politik yang artinya selain menjadi seorang militer, mereka juga diharuskan untuk berpolitik. ABRI sendiri muncul pada tahun 1962, yang merupakan gabungan dari organisasi angkatan perang dan kepolisian negara. Sehingga, pada masa pemerintahan Orde Baru, organisasi ini dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto untuk menjadi salah satu kekuatan politiknya dan bisa mempertahankan kekuasaannya. Hal tersebut sangat terlihat ketika Soeharto mulai membentuk kabinet, yaitu Kabinet Pembangunan I tahun 1968, sebagian besar departemen dan badan pemerintahan dikepalai oleh Perwira ABRI atau teknokrat sipil.⁵⁹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu langkah untuk tetap mempertahankan kedudukan Soeharto dan pemberlakuan Dwifungsi ABRI, maka

⁵⁸ Pertimbangan perubahan nama dari Makassar ke Ujung Pandang adalah Ujung Pandang merupakan nama yang digunakan oleh Pahlawan Sultan Hasanuddin, bahwa apa yang dinamakan "Makassar" itu sebenarnya adalah nama yang diberikan oleh orang atau penjajah Portugis dan Belanda, dan bahwa umumnya penduduk Makassar dan Sulawesi Selatan banyak yang mengenal kota ini dengan nama "Jumpangang." *Ibid.*, hlm. 513.

⁵⁹ Mohtar Mas'ood, *op.cit.*, hlm. 157.

struktur birokrasi politik diperbaharui. Pada saat inilah, ABRI banyak mengambil bagian dalam struktur pemerintahan sipil. Selain pemerintahan yang ada di pusat, maka di daerah pun diberlakukan ABRI banyak mengambil peranan mulai dari gubernur sampai kepada kepala desa.

Pilar utama rezim Soeharto adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI banyak terlibat dalam panggung politik pemerintahan Orde Baru, mereka tunduk terhadap rezim Soeharto, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya disetujui oleh kebanyakan para perwira, apalagi mereka yang telah pensiun. Mereka menginginkan bahwa tentara dikembalikan kepada profesionalisme dan tujuan Tentara sebagaimana mestinya. Para perwira ini ingin menjauhkan ABRI dari Soeharto, sehingga pada tahun 1980, muncul “Petisi 50”.⁶⁰

Apapun atau siapapun yang tidak setuju dengan pemerintahan Orde Baru, akan segera “disingkirkan.” Partai-partai yang ada harus mendukung sepenuhnya pemerintah, tidak terlepas juga terhadap para mahasiswa. Pada tahun 1978, terjadi “Normalisasi Kampus,” gerak mahasiswa dibatasi dan kebanyakan petinggi mahasiswa ditangkap, misalnya seperti yang terjadi di beberapa kampus di Indonesia. Misalkan yang terjadi di IPB, para anggota militer menduduki kampus dan menangkap para mahasiswa.

⁶⁰ Petisi 50 adalah petisi yang ditandatangani oleh 50 orang terkemuka, termasuk tokoh pensiunan ABRI seperti Nasution. Petisi ini menuduh Presiden Soeharto telah salah menafsirkan Pancasila dengan berlaku seolah-olah dia merupakan perwujudan darinya. Tuduhan lainnya adalah penyalahgunaan ABRI dengan menuntutnya untuk berpihak dalam urusan politik. M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 639.